



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA

KAMIS, 11 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara

PEMOHON

1. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Fatmayani Harli Tombili (Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Kamis, 11 Juli 2019, Pukul 14.02-16.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I Dewa Gede Palguna
- 2) Suhartoyo
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Jefriyanto
Bisariyadi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Basri Tahir
2. Periati Ginting
3. Gatra Setya El Yanda

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fernandy Rusdy
2. Albertus

C. Pemohon Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Zainuddin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Vinsensius H. Ranteallo

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Abu Muslim

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Fernandy Rusdy
2. Arman Alini
3. M. Fahreza
4. Andrew Simatupang

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Moh. Rozaq Asyhari
2. Aristya Kusuma Dewi

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Khalid Usman

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Aperdi Situmorang
2. Wahyudi

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Achmad Chaidir
2. M. Arie Syadewa
3. Adidharma Wicaksono

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Arah Madani
2. Hazlan

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Amin Manguluang
2. Dodi
3. Munawarman

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Alex Candra

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Nuzul Wibawa

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019:

Erlanda Juliansyah Putra

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019:

1. M. Rustiawan Ardiansyah
2. Fatwa Al Yusak

Q. Termohon:

1. M. Fadillah (KPU RI)
2. M. Nato Al Haq (KPU Sultra)

R. Kuasa Hukum Termohon:

1. Deni Martin
2. Miftakhul Huda
3. Imam Munandar
4. Syafran Riyadi
5. Rd. Liani

S. Bawaslu:

1. Bachtiar
2. Ajmal Arif
3. Siti Munadarma

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Om swatiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Kali ini untuk 11 Permohonan, sampai ... mudah-mudahan sampai menjelang magrib dan kalau tidak selesai juga, ya harus dilanjutkan. Tapi, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu secara efektif.

Yaitu, perkara untuk siang ini adalah Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, partai 09 ... Permohonan 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai nas ... Nasdem (Nasional Demokrat), Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Perkara Nomor 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya (Berkarya), Perkara Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan, Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019, ya ini untuk DPD atas nama Fatmayati Harli Tombili ... Fatmayani sori ... Fatmayani Harli Tombili.

Silakan kepada Para Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa dari Sulawesi Tenggara, saya, khususnya Kabupaten Bombana, Bombana I. Saya serahkan, Mulia (...)

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa namanya dulu? Perkenalkan dulu namanya (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Muhammad Basri Tahir, S.H.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa lagi silakan dari PKB!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan saya Periaty Ginting, Kuasa dari Caleg DPRD dari PKB Dapil Wakatobi I.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Wakatobi I?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sudah semua dari PKB? Masih ada? Masih? Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Saya Gatra Setya El Yanda, Kuasa Hukum.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa? Tolong pakai miknya. Biar bisa direkam. Itu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Saya ... perkenalkan, Yang Mulia. Nama Saya Gatra Setya El Yanda, Kuasa Hukum DPP PKB khusus untuk Caleg pada Dapil Buton III Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Masih ada dari PKB?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YANDA

Sudah, Yang Mulia. Cukup.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah? Baik. Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Golkar, kami yang hadir Kuasanya, saya, atas nama Vinsensius H. Ranteallo. Kebetulan ada satu rekan lagi dari Prinsipal. Silakan! Silakan!

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Prinsipal?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Dari DPP.

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ZAINUDDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Andi Muhammad Zainuddin dari pihak DPP dan Prinsipal untuk Partai Golkar 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ZAINUDDIN

Terima kasih.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ya, sudah Partai Golkar? Partai Amanat Nasional? Oh, belum tiba mungkin. Ya ... ya karena ada perubahan sedikit jadwal. Silakan dari Partai Keadilan Sejahtera!

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera ... Nama Mohammad Rozaq Asyhari, kami berdua ada rekan satu, kebetulan dapat tempat duduknya agak di ujung, Yang Mulia.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, iya. Ya, saya mohon maaf karena inilah ruangnya agak sempit tidak selebar ruang sidang pleno, jadi mungkin agak kurang nyaman sedikit, tapi tidak mengurangi esensinya, begitu ya. Silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya. Yang di ujung Ibu Aristya Kusuma Dewi, ada di ujung karena dapat nomornya di sana.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu? Ya, ya.

27. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ini disela oleh pilar yang sangat besar. Silakan dari Partai Nasdem Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPP Partai Nasdem, yang hadir hari ini, saya Aperdi Situmorang didampingi oleh Wahyudi di belakang saya, Yang Mulia.

30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, berdua saja?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Berdua saja, Yang Mulia.

32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Perindo, Yang Mulia.

36. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh, sori. Satu ... ya ... dari Partai Perindo 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini marah nanti ini Pak ... ini, ya silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Partai Perindo, kebetulan saya sendiri Achmad Chaidir, di sebelah saya Mochammad Arie Syadewa dan di belakang Adidharma Wicaksono. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kemudian ... Pak, yang di sebelah Bapak itu belum advokat?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Calon advokat, Yang Mulia.

40. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, masih calon advokat?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

42. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pantesan masih pakai jas rapi, ya. Kemudian, dari Perkara Nomor 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya? Ya, tidak hadir tampaknya atau belum hadir. Ya, dari pagi juga partai Berkarya sudah berapa perkara tidak hadir. Baik, Nomor Perkara 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami, nama saya Amin Manguluang didampingi oleh dua rekan kami ada Dodi dan Munawarman mewakili Kuasa Pemohon atas nama Irpan dari Partai PPP. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, terima kasih. Masih ada? Cukup, ya?

Tolong dimatikan dulu Pak, biar bisa hidup yang di sebelahnya. Bapak miknya tolong dimatikan dulu, ya. Ya, silakan kemudian dari Partai Gerinda Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Hukum Partai Gerinda yang mewakili yang hadir atas saya, atas nama Alex Candra. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sendiri saja, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Sendiri.

48. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kemudian dari Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diwakili oleh M. Nuzul Wibawa sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sendiri ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Sendiri.

52. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kemudian Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019 untuk DPD dari Fatmayani Harli Tombili?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019: ERLANDA JULASYAH SYAHPUTRA

Ya, terima Kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Erlanda Juliansyah Putra mewakili Prinsipal Ibu Fatmayani Harli Tombili, Caleg Nomor Urut 31 DPD.

54. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dari Termohon, silakan! Siapa yang mulai terlebih dahulu silakan!

55. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamuallaikum wr. wb. Kami dari Termohon kebetulan Prinsipal hadir dari Komisioner KPU RI perwakilan Bapak Muhammad Fadilah. Lalu, komi ... Prinsipal Komisioner dari Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak M. Nato Al Haq dan saya sendiri dari Tim Ali Nurdin and Partners, Deni Martin, S.H., dan sebelah kiri saya Agus Koswara, S.H.

56. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk perkara nomor berapa?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Kami untuk Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar, 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai PAN, dan 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya.

58. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Baik, terima kasih. Silakan, yang lain!

59. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ... perkenalkan nama saya Miftakhul Huda, Kuasa Hukum dari Termohon untuk Perkara 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan Nasdem, Nomor 114-

10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. PPP, Nomor 141-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perindo ada dari pihak kami Prinsipal perwakilan dari KPU RI dan Sulawesi Tenggara.

60. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ada, masih? Ya. Silakan!

61. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAN MUNANDAR

Terima kasih. Bismillahirrahmaannirrahiim. Assalamuallaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Imam Munandar saya dari Kantor Hukum Hicon, dalam hal ini sebagai Kuasa dari Termohon KPU RI yang khusus untuk menangani Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia, yang PKB ajukan di Sulawesi Utara. Terima kasih. Sulawesi Tenggara, maaf. Terima kasih. Assalamuallaikum wr. wb.

62. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan yang satu lagi!

63. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kantor Hukum Absar Kartabrata Law Firm, Kuasa dari KPU RI yang menangani perkara PKS, Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Gerinda Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya sendiri Syafran Riyadi, S.H. dan rekan saya Raden Liani. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Masih ada dari Termohon? Sekarang giliran dari Pihak Terkait. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDY RUSDY

Bismillahirrahmaannirrahiim. Perkenalkan saya Fernandy Rusdy, Yang Mulia. Kami mewakili dari Tim Hukum PDIP untuk Nomor Perkara 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

66. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Oh, ya. Jadi, untuk PKB dan partai Golkar, ya?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDY RUSDY

Siap, Yang Mulia.

68. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Silakan yang lain.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPP partai Golkar mewakili Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai Pihak Terkait, kemudian ada juga diwakili oleh Prinsipal, terima kasih.

70. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Prinsipalnya mana? Bapak, silakan sekalian perkenalan diri dulu, Pak, kalau ini (...)

71. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARMAN ALINI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Arman Alini dari Dapil I Wakatobi. Terima kasih.

72. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Silakan, Pihak Terkait yang lain berikutnya?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD FAHREZA

Bismillahirrahmaannirrahiim. Assalamuallaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Tim Advokasi Indonesia Raya DPP Partai Golkar dengan Nomor Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, nama saya Muhammad Fahreza. Jadi, sedikit ini, Yang Mulia. Mohon izin ada perbaikan di surat kuasa, ada kesalahan pengetikan pada surat

keputusan KPU Nomor aturan seharusnya 987 bukan 978, mohon kiranya dapat diperbaiki sekarang atau setelah keterangan Terkait.

74. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti ... nanti setelah ini kita masih berkenalan dulu, ya.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD FAHREZA

Siap.

76. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan Pihak Terkait yan berikutnya!

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KHALID USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Pengacara Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang hadir pada saat ini adalah Khalid Usman, S.H., didampingi oleh 2 rekan saya, Fahd Atsur, S.H., M.H. dan Hidmansyah, S.H. Ya, Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Pemohon PKS.

78. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Ya, masih ada?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG

Selamat siang, Ketua.

80. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG

Ya, kami dari DPP Golkar Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dapil I DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Saya Andrew Simatupang dan bersama Prinsipal saya.

82. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan perkenalkan diri sekalian, Pak, siapa? Prinsipal?

83. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABU MUSLIM

Assalamualaikum wr. wb.

84. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsallam wr.wb.

85. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABU MUSLIM

Mohon izin, Yang Mulia.

86. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

87. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABU MUSLIM

Nama saya Abu Muslim dari Dapil Kolaka Utara I, Sulawesi Tenggara.

88. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terakhir perkenalan dari Bawaslu. Oh, masih ada, ya? Oh, masih ada, ya? Mohon maaf, mohon maaf.

89. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI

Terakhir, Yang Mulia.

90. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

91. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI

Terima kasih, Yang Mulia.

92. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI

Perkenalkan. Assalamualaikum wr. wb.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumussalam wr. wb.

94. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI

Saya Arah Madani, Kuasa Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera. Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Perindo. Hadir juga rekan kami di belakang Hazlan. Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Namanya siapa tadi, Pak?

96. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI

Arah Madani.

97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya pikir Ahmad Dhani tadi. Ya, ya, silakan ... silakan. Baik, terima kasih.

98. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI

Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dia itu bukan dengan Dewa 19.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait anggota DPD Perseorangan yang diajukan oleh Ibu Fatmayani Harli Tombili.

101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN

Mewakili dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.OG. Kami kuasa hukum. Saya sendiri atas nama M. Rustiawan Ardiansyah dan rekan saya Fatwa Al Yusak, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Silakan, kalau masih ada. Masih ada? Sudah, ya? Baik, sudah. Sekarang dari Bawaslu!

104. BAWASLU RI: BACHTIAR

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan untuk menyampaikan. Yang hadir pada hari ini dari Pihak Bawaslu. Dari Bawaslu Sultra (Sulawesi Tenggara) ada 3 orang itu yang pertama, Pak Hamiruddin Udu.

105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

106. BAWASLU RI: BACHTIAR

Kemudian, Bapak Ajmal Arif. Kemudian, dengan Ibu Siti Munadarma. Dan saya sendiri Bachtiar dari Tim Hukum Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih, Pak.

107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kita semua sudah berkenalan masing-masing dan sekarang kami mempersilakan kepada Pemohon Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Mungkin dalam kurun waktu tidak ... kurang dari 10 menit. Tidak semua perlu disampaikan

karena kita semua sudah menerima Permohonan yang tertulis. Poin yang hendak Anda menjadi tekanan saja dan kemudian itu yang membuat Anda mengajukan petitum seperti tertuang dalam petitum Permohonan yang dimintakan kepada Mahkamah. Dan untuk ini kami mohon kesediaan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memimpin persidangan.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Ketua. Baik, Wakatobi dulu, ya. Siapa yang menyampaikan? Silakan! Langsung ke dalil-dalil saja. Yang dipersoalkan apa?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Tadi sudah berkenalan. Langsung ke pokok.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Hal Permohonan keberatan atas hasil (...)

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu enggak usah dibaca itu. Katanya mau langsung ke pokok?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya. Poin V Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi Nomor 36/Pl.2.6-PA/7407/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 29 April 2019 telah menetapkan hasil pemilihan umum legislatif Kabupaten Wakatobi Tahun 2019.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Berdasarkan peringkat perolehan 7 suara terbanyak sebagai berikut.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor ... langsung ke nomor Anda saja! PKB nomor berapa? Dapatnya berapa?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya, pada urutan ke-5 ada Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebanyak=1.106, konversi=0 kursi. Bahwa berdasarkan keputusan (...)

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang menjadi persoalan dari perolehan suara itu?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Bahwa Pemohon telah dirugikan atas Berita Acara Rekapitulasi dan SK Penetapan Hasil sebagaimana disebut di atas. Dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah. Tidak diindahkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (7) yakni tentang keharusan menjalani (...)

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu ketentuannya itu, Ibu. Sekarang konkretnya apa yang dialami? Kerugian yang dialami?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Oke.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang berkaitan dengan suara apa?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Yang berkaitan dengan suara. Langsung pada poin yang nomor 7. Terjadinya manipulasi perolehan suara di sekurang-kurangnya pada Permohonan awal kami ada 8 TPS, tapi belakangan kami telah susulkan 3 C-1 jadi 11 TPS. Antara lain, melalui penambahan suara untuk Partai Golkar dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga pada penggelembungan suara di TPS-TPS yang lain sebagaimana nyata di Formulir C-1 telah kami lampirkan pada bukti yang diberi kode P-4 dan penambahan P-4.1.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Oleh karena terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara sebagaimana ... sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah sangat dirugikan dan mengalami ketidakadilan atas rekapitulasi dan penghitungan suara di Dapil Wakatobi 1 sebagai berikut. Kami uraikan TPS-TPS nya dan selisih (...)

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, langsung. 1 TPS 10?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

TPS sel ... 10 Kelurahan Pongo, Partai Golkar seharusnya memperoleh 73 diubah menjadi 93, selisih 20 suara. TPS 3 Longa, Partai Golkar seharusnya 58 diubah menjadi 70, selisih 12 suara. Pada TPS 7 Kelurahan Wanci, Partai Golkar seharusnya memperoleh 23 diubah menjadi 78, selisih 55 suara. Pada TPS 1 Desa Sombu, Partai Golkar seharusnya memperoleh 29 diubah menjadi 79, selisih 2 ... 50 suara. Pada TPS 6 Kelurahan Pongo, Partai Golkar seharusnya 22 diubah menjadi 30, selisih 8 suara. TPS 1 Longa, Partai Golkar seharusnya memperoleh 31 diubah menjadi 39, selisih 8 suara. Pada TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, Partai Golkar seharusnya 61 diubah menjadi 101, selisih 40 suara. Pada TPS 1 Desa Maleko, Partai Golkar seharusnya memperoleh 50 diubah menjadi 54, selisih 4 suara.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Pada tambahan bukti kami, kami lampirkan 3 C-1, yaitu TPS 9 Wanci seharusnya 62 menjadi 73, selisih 11 suara (...)

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, itu di mana itu? Tambahan di mana Ibu, itu?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Kami lampirkan menyusul C-1 nya karena baru dapat (...)

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, ini kan bicara dalil bukan bukti.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Oh, ya.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalilnya ditambahkan atau bagaimana?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Belum ... belum dimasukkan di sini, Yang Mulia. Nanti kalau (...)

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Diizinkan (...)

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak bisa lagi menambahkan dalil.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Oh, baik.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau misalnya salah ketik.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Typo-typo itu masih boleh, tapi kalau menambah dalil enggak bisa.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung ke itu berikutnya, petitum atau mau menyimpulkan dengan demikian akumulasi yang dirugikan berapa (...)

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perolehan untuk lawa ... Partai Golkar berapa? Kan bisa disimpulkan ini.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Dengan adanya penambahan suara pada 8 TPS tersebut, maka suara Partai Golkar berdasarkan C-1 suara Partai Golkar bertambah dari 5.526 menjadi ini salah ketik (...)

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa mestinya?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

5.537 pada data PPK yang kami peroleh kemudian.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 55 (...)

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

5.537 ... yang 5.741 (...)

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari berapa ke berapa? Dari?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

5.741.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5741 ... bukan. Ini kan bertambah dari berapa? 5.526?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

He eh. Menjadi (...)

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini benar?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menjadi?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

5.537

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5.537. Baik.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Sedangkan setelah rekapitulasi tingkat KPUD suara Partai Golkar bertambah menjadi 5.872 itu yang di sidang pleno dan yang sampai di tingkat KPU dan KPU nasional.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Terus?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Oleh karena adanya penggelembungan suara perolehan Partai Golkar mengakibatkan Golkar mendapatkan 3 kursi yang seharusnya adalah 2 kursi jika dikonversi sebelum penggelembungan. Oleh karena manipulasi dengan tujuan penggelembungan suara ke Partai Golkar

tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan 1 perolehan kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon atas nama Caleg PKB Nomor Urut 1, Drs. H. Masiuddin.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Petitemnya apa?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutuskan Permohonan ini sebagai berikut dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi Nomor 36/PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum, khususnya tentang memutuskan menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum legislatif untuk Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Urut Partai 1 ... Nomor 01 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Calon Legislatif Nomor Urut 01 atas nama Drs. H. Masiuddin sebagai salah satu calon legislatif terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang memperoleh kursi ke 6 pada Pemilu Tahun 2019.
5. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk melaksanakan pemilihan suara ulang untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Wakatobi, Dapil Wakatobi 1.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemungutan suara ulang?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau apa maksudnya? Untuk melaksanakan pemilihan suara ulang? Pemungutan suara ulang?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa?

169. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemilihan apa pemungutan? Kan tadi pemilihan.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemungutan apa pemilihan?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Pemilihan suara ulang, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pemilihan? Benar pemilihan?

173. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana yang benar?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Oh.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibaca ini yang dibaca apa adanya saja. Maunya apa ini? Mau diganti apa tetap ini? ... Ibu?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya, siap.

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ini maksudnya? Pemungutan suara ulang?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Pemungutan suara ulang.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ayo lanjutkan Nomor 6!

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing, dalam waktu paling lambat 2 hari setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang sesuai pelaksanaan amar putusan a quo.

8. Dan yang terakhir. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya. Atau (...)

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Apabila, Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Hormat kami, Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa, Kuasa Pemohon, Periaty B. R. Ginting, S.H., M.H., M.Kn. Terima kasih.

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya siji ... hanya 1 ini, ya? Kuasa Hukumnya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya, 1 saja, Yang Mulia.

187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, dilanjutkan dulu ke Buton Tengah. Nanti kalau koreksi, di belakang.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang mau menyampaikan?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Siap, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Silakan, pokok-pokoknya!

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Baik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, mohon diperkenankan untuk dianggap telah dibacakan.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Terkait dengan legal standing, dimohonkan untuk dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Terus terkait dengan tenggang waktu. Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal, yang awal, Yang Mulia, pada tanggal 24 (...)

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih tenggang waktu?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Masih tenggang waktu, Yang Mulia (...)

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah enggak usah dibacakan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Termasuk dengan perbaikan.

Pokok Permohonan bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu pada 17 April 2019 terjadi persoalan di TPS 1 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka ... Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Jenis-jenis kecurangan atau pelanggaranannya itu pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tetapi tetap menyalurkan hak pilihnya dengan e-KTP sebagai kategori daftar pemilih khusus.

199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Dan Termohon justru memberikan 5 jenis surat suara, sehingga memilih pula Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah. Meskipun pemilih tersebut bukan beralamat di daerah Kabupaten Buton Tengah. Nah, (...)

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Pelanggaran tersebut sudah ditegur oleh pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua, tetapi tidak ditindaklanjuti. Atas kejadian tersebut, pengawas yang menegur tadi telah membuat laporan atas kecurangan tersebut. Ada di dalam Bukti P5-A.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Ya. 5 suara tadi diberikan ke siapa? Tahu tidak?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Tidak tahu, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Tidak tahu, ya? Baik. Dugaan kecurangan itu.
Kemudian, yang kedua?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Kecurangan tersebut juga diketahui oleh warga, sehingga warga bikin laporan terkait pelanggaran tersebut, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Ada di Bukti P-5B dengan nama pelapor adalah Saudara Basyarun.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Nomor laporannya ini, ya?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Siap, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Terus apa respons dari pengawas?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Respons tidak dilanjutkan atas laporan tersebut, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Dengan alasan ini pemungutan suara ulang. Terus apa alasan tidak ditindaklanjuti?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Alasan tidak dilanj ... bahwa itu tidak dilanjutkan. Sebentar, Yang Mulia, mohon izin.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Mestinya kan Saudara sudah buat ringkasan.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Ya.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Oke, kecurangan lain lagi apa?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Sudah ada ini, Yang Mulia. Mohon izin, sudah ada rekomendasi dari panwaslu kecamatan.

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Berupa?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Kepada panitia pemilihan kecamatan agar melaksanakan rekomendasinya.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTYO

Ya, terus?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Tapi tidak dilanjutkan. Sehingga sampai bikin membuat laporan kembali, Yang Mulia

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melakukan rekomendasi kembali!

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa alasan tidak menindaklanjuti?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Alasannya cuma disebutkan, "Tidak dapat melaksanakan rekomendasi berupa melakukan PSU," Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Itu di poin 12 itu, ya?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Ya, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian apa yang akan dipermasalahkan selanjutnya? Apakah mempersoalkan itu ke Mahkamah Konstitusi soal itu saja atau masih ada persoalan lain yang ingin disampaikan dalam Permohonan ini?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Menurut kami, dengan adanya pelanggaran tersebut itu menu ... me ... menyebabkan beberapa ... beberapa suara itu tidak jelas, Yang Mulia, dan pemilihannya akan cacat, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Tapi hanya seputar di 5 suara itu?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Siap, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa petitumnya?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Petitumnya yang pertama, mengabulkan per ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, membatalkan keputusan komisi pemilihan umum nomor ... mohon izin, Yang Mulia, ada dobel ... dobel pengetikan, nomor-nomor.

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton.

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak menyebut TPS-nya ini?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Yang ke-3, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh ya. Sori.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Yang ke-3.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS, ya? TPS 01 Lakorua, ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Ya. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.

Yang keempat, memerintahkan Termohon untuk mematuhi dan me ... melaksanakan putusan ini. Atau ex aequo et bono, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Terima kasih.

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Nanti direspons oleh KPU Sulawesi Tenggara ini atau jajaran yang di bawahnya secara berjenjang melalui jawaban perbaikan nanti, atau mungkin juga sudah direspons.

Langsung ke Bombay (...)

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Bombana, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bombana, ya. Maaf, Pak.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya.

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bombana 1?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Bombana 1, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja ke Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil I. Pemohon Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bombana menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara Kabupaten Bombana Dapil I PKB menurut versi Termohon=1.490, Pemohon=1.490.

251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PKB?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

PKB.

253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, lanjutkan, Pak.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Terus selanjutnya PDI Perjuangan. Langsung saja, Yang Mulia. 1.510, untuk versi Termohon. Terus versi Pemohon=1.472. Jadi, selisih=38, Yang Mulia.

Terus yang berikutnya anggap di ... sudah dibacakan karena sudah ada di tabel, Yang Mulia.

Berdasarkan de ... tabel di atas, 5 kursi untuk DPRD Kabupaten Bombana Dapil I ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, dan PAN. Sedangkan apabila tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebelumnya di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, maka 5 kursi tersebut yang harus ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai PKB,

Gerindra, Nasdem, PPP, dan PAN. Bahwa mana yang selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bombana menolak hasil pemungutan suara ulang yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bombana untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bombana Dapil I, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya terhadap pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2019 dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan pemungutan suara PSU tersebut tidak ada disebutkan di dalam surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 166 dan seterusnya perihal Pemberitahuan Pelaksana Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 Tanggal 23 April 2019 dan surat KPU Kabupaten Bombana nomor dan seterusnya perihal Pemintahan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019.

Bahwa surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kabupaten Bombana yang dilaksanakan PSU, yaitu hanya 5 TPS, yaitu TPS 3 Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora, Kecamatan Mata Oleo.

Bahwa terhadap tempat pemungutan suara TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sudah dilakukan rapat pleno kecamatan di tingkat p ... PPK Kecamatan Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta pemilu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, begitu pula di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta pemilu atau dari pihak manapun sehingga hasil perolehan suara peserta pemilu di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah sah dan tidak perlu pemungutan suara ulang.

Empat. Bahwa akibat dilaksanakannya pemungutan suara ulang yang tanpa pemberitahuan kepada peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai peserta pemilu yang lainnya, yaitu sangat merugikan Pemohon karena berakibat hilangnya perolehan kursi ke-5 Partai Kebangkitan Bangsa karena bertambahnya suara Partai PDI Perjuangan yang juga memperebutkan kursi ke-5 Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten Bombana. Dimana rincian perolehan suara partai politik sebelum pemungutan suara ulang di luar TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Total perolehan suara partai ... Partai Kebangkitan Bangsa sebelum PSU di Dapil I Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, dan Kecamatan Masaloka Raya yaitu=1.490 suara. Sedangkan setelah pemungutan suara ulang yaitu perolehan suara Partai PKB seluruh rakyat yaitu tetap=1.490 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Politik PDI Perjuangan sebelum pesu ... PSU,

ditambah setelah PSU di Dapil I dengan pemberitahu ... pemberitahuan PSU yang sah, ya, itu 1.472 ... 1.472 ... 72 ... suara. Namun apabila ditambah dengan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia yaitu=1.510 suara, atau bertambah sebesar 38 suara. Sehingga perselisihan dua ... 20 suara untuk pemenangan (...)

255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selisih (...)

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, selisih suara untuk kemenangan PDI Perjuangan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Berikutnya apabila tidak dilaksanakan PSU susulan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, maka perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa lebih besar 18 suara dibandingkan dengan perolehan suara Partai PDI Perjuangan yaitu suara Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 1.490 suara, sedangkan suara Partai PDI Perjuangan 1.472 suara.

Sehingga yang berhak untuk mendapatkan kursi kelima Daerah Pemilihan I Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2019 adalah Partai Kebangkitan Bangsa.

257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, sudah itu pengulangan juga ini yang 6 ini. Kan ada 23 suara yang (...)

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, ya, Yang Mulia.

259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang menimbulkan pertanyaan dari mana, begitu kan?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, ya.

261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau PKB kan tetap dari hasil PSU?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, Yang Mulia, tetap.

263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PDI bertambah, sehingga mendapat suara lebih banyak, sehingga dapat kursi. Apa Petitumnya?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas. Pemohon memohon kepada Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab.Bombana/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 5 Mei 2019. Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bombana sepanjang di Daerah Pemilihan I Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana di Daerah Pemilihan I Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PKB berapa, PDI ... ini kan yang (...)

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

PKB=1.490, PDI Perjuangan=1.472 versi Pemohon. Dalam perolehan suara Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana, Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di dapil I sesuai dengan jumlah perolehan yang dimohonkan. Saya kira ada di tabel, Yang Mulia.

267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi boleh tidak, tahu ini ... meskipun ini politik ... partai politik ... calegnya yang mana ini yang Anda maksud?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Calegnya (...)

269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak bisa menunjukkan kan?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ada, Yang Mulia. Saudara Alwan, Yang Mulia, yang kami maksud.

271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa? Di tabel nomor berapa? Zalman bukan Alwan?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Alwan, Yang Mulia. Nomor 5, Yang Mulia. 689.

273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enam ratus ... Alwan, ya? Nomor 5, ya? Baik. Ini sebenarnya kan karena Permohonan partai ... ini kan nanti dengan sendirinya akan terangkat orang yang bersangkutan. Tapi enggak apa-apalah, ini kan kadang-kadang menjadi ... oke, Petitem berikutnya?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan putusan ini atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Rumbia, Kabupaten Bombana.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Baik, sekian, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan koreksi untuk yang Bombana dulu tadi ... yang mumpung masih hangat ... yang terakhir. Objek Permohonan Berita Acara KPU Kabupaten Bombana, ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya. Baik, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 61 ini?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan objek Permohonan adalah Keputusan KPU, ya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Keputusan KPU, Bombana.

283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KPU Mana? Bombana? Bukan KPU pusat ya?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya. Kabupaten Bombana, Yang Mulia.

285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Baik. Termasuk pembatalannya pun, pembatalan berita acara yang dimaksudkan itu, ya?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan lagi kaitan dengan KPU Pusat?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Khusus Kabupaten Bombana, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Oke.
Kemudian, kartu anggota kuasa hukum sebagai advokat belum dilampirkan.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Oh, ya.

291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti disusulkan, ya?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Ya, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, firm dengan apa yang dibacakan tadi termasuk objek maupun petitumnya Berita Acara itu, enggak ada perubahan?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Tidak ada, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, supaya dicatat di persidangan. Sekarang untuk Buton Tengah. Penomorannya SK KPU yang seharusnya=987, di sini=87. Ini dikoreksi tidak, ini? Tadi kan, memang dianggap dibacakan. Buton Tengah, mana? Mau dikoreksi atau tetap 87?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

Dikoreksi, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA ER YARINDA

987.

299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

987, ya? Kemudian, tidak atau belum lampirkan kartu advokat, paling tidak kopiannya, ya? Nanti disusulkan.

Untuk Wakatobi, objek Permohonannya tidak disebutkan secara letterlijk. Ndak ada di situ, tetap dikosongkan objeknya ini? Ibu?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak dijawab? Kami (...)

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Objek Permohonan (...)

303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak menyebutkan apa? Surat keputusan KPU?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Surat keputusan KPU Wakatobi (...)

305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Nomor 36.

307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 36, ya?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kami, tambahkan, tuh. Ini Nomor 36?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa nomornya? Masa Nomor 36 doang?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Waktobi Nomor 36/PL.02.6-BA/7407/KPU.Kabupaten/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, ya?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan SKK Pusat, ya? Ya?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya, betul.

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Termasuk petitumnya itu dong, yang diminta, ya?

318. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Golkar, ya?

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Yang berkaitan dengan petitum berarti Berita Acara ini, kan?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya, yang Nomor 36.

321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian, di dalam kedudukan hukum tidak menyebutkan partai PKB merupakan partai peserta pemilu nomor urut berapa? Dan mungkin di sini juga harus termasuk keputusan KPU tentang PKB sebagai peserta pemilu, SK-nya nomor berapa? Ini mesti harus dilengkapi kalau ... tapi kalau ... ah, sudah terlanjur disampaikan dan waktu perbaikan juga sudah habis. Oke, nanti Mahkamah yang mempertimbangkan. Kuasa hukum belum menyampaikan kartu anggota advokatnya, ya?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Sudah, Yang Mulia. Mohon maaf.

323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi di perkara ini belum. Mungkin di perkara yang gelondongan, ya? Seharusnya tiap perkara ada dilampirkan kartu anggota.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Saya lampirkan kartu anggota dan Berita Acara Sumpah di belakang Permohonan.

325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ibu dapat kuasa di berapa perkara?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Satu.

327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu ini saja?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Satu, ya, ini saja.

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dicek, ya? Belum ada. Kata Ibu ini sudah ada.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Baik, saya lampirkan lagi nanti.

331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu menyerahkan melalui partai atau melalui langsung? Melalui ... kan, ada ... waktu datang sendiri menyerahkan atau dilampirkan di berkas permohonan? Apa ketika dapat kuasa dari partai itu, kemudian (...)

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Saya lampirkan saat mengajukan permohonan, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Mahkamah Konstitusi, ya?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Benar.

335. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dicek kembali. Nanti, Ibu, anu ya, minta konfirmasi kalau sudah atau belumnya, ya? Setelah sidang nanti, ya? Kalau belum, nanti tolong dilengkapi.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Baik.

337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk bukti, Pak Ketua. Terima kasih.

338. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Untuk bukti dari Buton ... Kabupaten Buton Tengah 3, Anda menyampaikan bukti P-1 A sampai dengan bukti P-12, benar? Halo?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Ya, benar, Yang Mulia.

340. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Buton Tengah 3, siapa yang (...)

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Ya. Bukti kita yang kita ajukan dari P-1 A sampai dengan P-12, Yang Mulia.

342. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, kan?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Betul, Yang Mulia.

344. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu sudah kami periksa dan sudah kami verifikasi sudah lengkap. Jadi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bombana 1, itu ada catatan begini, bukti P-11 dan Bukti P-12 Anda itu sama. Jadi, ada 2 nomor, tapi buktinya sama. Itu nanti tolong dikoreksi di belakang, ya?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI TAHIR

Baik, Yang Mulia.

346. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu. Kemudian dari bukti P-1 sampai 13, kecuali yang sama tadi itu sudah lengkap sehingga bisa kami sahkan kecuali yang sama itu, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Wakatobi. Yang bukti awal Anda menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Betul.

348. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah lengkap. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian bukti yang Anda beri tanda Bukti P-4.1.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Ya.

350. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu tambahan bukti untuk TPS 04 nya itu tidak ada.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

09, Yang Mulia. Itu penulisannya.

352. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, salah, ya? Nanti dikoreksi di belakang kalau begitu! Itu lain artinya itu nanti kalau menyebut TPS kan? Bisa TPS tetangga yang disasar nanti itu.

Kemudian bukti P-1 yang Anda serahkan itu, bukti tambahan P-1 itu yang diserahkan tanggal 31 Mei 2019, ternyata belum dileges, dan tidak ada perbaikan pada daftar bukti. Nanti di reor ... reorganisasi lagi, Ibu, ya? Di belakang, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Baik, Yang Mulia.

354. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, itu ... jadi, yang bukti awal P-1 sampai P-6 sudah kami sahkan tadi. Yang berikutnya itu yang masih ada "masalah". Nanti di ... setelah persidangan ini diinikan dengan Panitera atau Panitera Pengganti di belakang, ya.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PERIATI GINTING

Siap.

356. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Dengan demikian, maka untuk Permohonan Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa sudah selesai. Kita lanjut ke permohonan dari Partai Golongan Karya Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Untuk ini kami mohon, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu.

357. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Untuk Partai Golkar ada yang partai, kemudian ada yang perorangan, ya?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Yang 1 eksternal, yang 1 internal.

359. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, Yang Mulia.

361. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan yang eksternal dulu.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik, Yang Mulia. Sebelum kami memulai, kami ada renvoi di permohonan. Yang pertama di halaman 2. Di situ tertulis vide Bukti P-1 mestinya vide Bukti P-4 ... P.1 ... P.4-1. Selanjutnya, di Bukti P.4-1a di halaman 3. Di sana tertulis Bukti P-2. Kemudian, di halaman 4 tentang tenggang waktu di situ tertulis tanggal 23 Mei 2019, mestinya tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WITA (...)

363. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pukul 00.02 WITA, ya?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

365. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tetap, ya?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

Lalu, koreksi berikutnya di halaman 5 ... di halaman 5 alinea di bawah tabel itu. Di sana tertulis form C-1 tersebar di 12 kecamatan, mestinya di 18 kecamatan. Itu di halaman 5. Terus, selanjutnya di tabel itu ... di persandingan perolehan suara partai menurut Termohon dan

Pemohon, di peroleh Pemohon di situ mestinya tertulis ... ini salah input ya, 46 ... 46.660.

367. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan 662?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, jadi 46.660 itu yang versi Pemohon. Kemudian di Partai Gerindra versi Pemohon itu tertulis yang lama ... itu tertulis 15.537 mestinya 15.492.

369. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

15.492?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, itu di halaman 5 tabel 1.

371. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berarti selisihnya juga beda, ya?

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, Yang Mulia.

373. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kemudian, yang pertama tentu selisihnya 54 untuk Partai Golkar. Yang kedua, Partai Gerindra selisihnya 140, Yang Mulia.

Nah, ini juga tentu terkoreksi ke bagian Petitem di halaman 17, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Di situ mestinya tertulis seperti di depan. Perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon 46.660 dan perolehan Partai Gerindra menurut Pemohon 15.492, ya.

377. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, itu.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Terus, yang berikutnya, koreksi menyangkut salah ... salah posisi halaman kalau tidak salah di hasil jilidan. Di situ ... apa ya ... mestinya halaman 17 bertukar dengan halaman 16 kalau tidak salah.

379. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, betul.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, jadi agak membingungkan kalau sekilas kita lihat. Baik, kami langsung dari eksternal dulu, ya?

381. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Untuk Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar. Untuk identitas para pihaknya, kami anggap terbacakan. Kemudian, termasuk kewenangan Mahkamah Konsitusi yang pertama (...)

383. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kedudukan hukum legal standing, kami anggap dibacakan.

385. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Termasuk tenggang waktu pengajuan Permohonan.

387. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Di sana tadi ada koreksi tanggal 24 Mei 2019 masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

389. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Selanjutnya, kami langsung masuk ke pokok perkara (...)

391. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang dipersoalkan di dalam (...)

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik.

393. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan, ya?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Pokok Permohonan, ya.

395. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terutama itu di 3 TPS di kecamatan enggak sesuai itu, ya?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Oh, itu untuk yang ... apa ... untuk yang internal itu, Pak.

397. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, sudah internal itu?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Itu yang internal. Kalau ini yang eksternal.

399. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ini terkait dengan Partai Gerindra.

401. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oke. Ya, ya.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik. Kami mulai untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi ... DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil V. Nah, di tabel pertama persandingan perolehan suara partai menurut Termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil V (...)

403. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tadi dikoreksi?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya. Itu tadi yang sudah kami koreksi.

405. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Nah, kemudian ... ya, sesuai bukti Pemohon termasuk bukti. Nah, tadi ada koreksi yang (...)

407. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman (...)

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

12 kecamatan mestinya 18 kecamatan, itu sesuai juga dengan bukti yang kami ajukan.

409. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kemudian, kami perlu jelaskan bahwa modus ... apa ini ... pelanggaran atau apa, perolehan suara ini pertama ada 2 jenis polanya. Yang pertama, penambahan suara di Partai Gerindra dan yang kedua pengurangan Partai Golkar. Nah, di tabel pertama yang halaman 5 di situ yang terisi di Partai Gerindra versi Termohon=56.

411. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Versi apa (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

DA-1 (...)

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

DA-1=57.

414. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

57.

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Jadi, di situ ada penambahan.

416. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Atau penggelembungan. Kemudian, contoh lain yang Partai Gerindra yang di tabel 2 di TPS 3 Muara Lapao pao, Kecamatan Wolo di

halaman 5. Kemudian, tabelnya ada di halaman 6. Di situ misalnya, Partai Gerindra menurut Pemohon=27, menurut C-1 ternyata hanya 17. Jadi, terjadi selisih 10 suara.

418. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Nah, itu selanjutnya polanya seperti itu.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kemudian, tempat dimana Partai Golkar misalnya di nomor 7 halaman 8. Misalnya Partai Golkar di situ menurut Termohon=193, tetapi di C-1=199.

421. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di Desa Bende itu, ya?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, kita sandingkan begitu, Yang Mulia.

423. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Nah, kemudian yang di (...)

425. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu polanya, polanya.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Polanya seperti itu.

427. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Terus di nomor 9 tabel di d .. TPS 12 Kelurahan Lalombaa, di situ Partai Gol ... Partai Gerindra di DAA-1 dan di C-1=25.

429. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Tetapi menurut Pemohon di situ terjadi kesalahan ... apa, ya ... perhitungan. Tertulis 2 ... 20, mestinya mereka rekap di 25 dan itu berjenjang ke DAA-1, dan DA-1, dan selanjutnya. Nah, itu pola-pola itu, sehingga kami langsung ke yang terakhir. Jadi, ini terjadi di 18 kecamatan tersebar di berbagai kelurahan di TPS-TPS.

431. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS H. RANTEALLO

Datanya ... ada dalam bukti kami, Yang Mulia.

433. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Untuk itu, kami anggap ini semua dibacakan.

435. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Sehingga kami langsung ke Petitem.

437. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Halaman 16, ya?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya. Ke halaman 16, Yang Mulia.

439. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Di halaman 16, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang dan seterusnya sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sulawesi Uta ... Sulawesi Tenggara mestinya ini, Yang Mulia.

441. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Di sini tertulis Sulawesi Utara, mohon maaf.

443. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Sulawesi Tenggara, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sultra V. Sampai di situ titik, Yang Mulia karena di kebelakang itu ... itu dalil menyangkut Dapil I. Baik, terus (...)

445. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya. Dicoret saja, Yang Mulia, yang dari Sultra V. Di situ mestinya titik karena keterangan yang di belakang itu untuk DPRD Kolaka Utara Dapil I. Kemudian:

3. Petitum kami adalah menetapkan hasil perolehan suara partai yang benar untuk keanggotaan DP ... keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sultra 5 sebagai berikut, perolehan suara partai yang benar untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Partai Golkar=46.660 menurut Pemohon. Jadi (...)

447. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tadi tertulis 52?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang ... yang tadi terkoreksi, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kemudian poin 4 Petitem kami, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itu kemudian kita melangkah ke ... apa ... DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

451. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ini untuk Dapil I, Yang Mulia. Ini sebenarnya sengketa internal, ya.

453. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Antara Pak Kana dan Abu Muslim (...)

455. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak Abu Muslim. Ya.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Jadi, saya kira di sini cukup jelas, Yang Mulia. Kami mohon baik Posita maupun petitemnya, dianggap terbacakan.
Demikian, Yang Mulia.

457. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Petitemnya dibacakan coba!

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Oke, baik, Yang Mulia.

459. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Petitemnya yang pertama. Mengababulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

461. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang kedua membatalkan keputusan KPU Nomor 987/PLT.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 13.46 WIB. Sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kolaka Utara, Dapil 1.

463. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang ketiga. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS di Kecamatan Lasusua, yakni TPS 3, TPS 7, TPS 9, Kecamatan Lasusua.

Yang keempat. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian hormat kami, Kuasa Hukum.

465. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik.

Ada beberapa catatan dari Kepaniteraan. Itu terdapat 2 Kuasa Hukum. Masing-masing surat kuasa dari DPP Golkar atas nama Alberthus, S.H., dan M. Sattu Pali, S.H., M.H.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

Kemudian, Kuasa Hukum belum menyampaikan fotokopi kartu tanda advokat.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik.

469. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

Selanjutnya, mengenai bukti pada Pak Ketua.

470. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Kuasa Hukum ini dua-duanya berlaku?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang ... yang (...)

472. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terdapat Kuasa Hukum ini masing-masing dari DPP Golkar itu.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang dari DPP Golkar, ya?

474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atas nama Alberthus, S.H., dan Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H. Dua-duanya (...)

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Yang Alberthus. Atas nama Alberthus, Yang Mulia.

476. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang terus ini? Pak Muhamad Sattu Pali ini bagaimana?

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Oh, ya berlaku juga. Orang DPP juga, Yang Mulia.

478. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu jadi berlaku tetap?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, baik.

480. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, jadi dari Pak Sattu Pali ini dengan Bapak jadi 2. Gitu, ya? Jadi, keduanya berlaku, ya?

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Berlaku, Yang Mulia.

482. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Pak Muhammad Sattu Pali ini ndak pakai ... tapi ndak ikut bertanda tangan di permohonan, ya?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, Yang Mulia.

484. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa itu, Pak?

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kebetulan ibunya sedang berduka di Toraja sejak ... kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah pulang kampung, Yang Mulia.

486. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

488. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi statusnya masih ini?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Masih.

490. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini ada anu, Pak, ada ... ada risiko sih. Misalnya nanti kalau pada persidangan berikutnya tidak hadir, kalau tetap tidak bertanda tangan, beliau gak bisa duduk di situ.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Oh, ya. Engga apa-apa, Yang Mulia.

492. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau nanti di misalnya anu. Kecuali kalau kemudian beliau menandatangani ya (...)

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

494. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Misalnya setelah sidang ini atau ikut tanda tangan.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Mungkin minggu depan baru bisa pulang, Yang Mulia.

496. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

498. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

Kemudian, saya mau sampai kepada bukti dulu. Mohon konfirmasi, mohon diperhatikan Pak, ya?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, Yang Mulia.

500. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk bukti yang sengketa internal itu, mohon di ... dicek. P-1 sampai dengan P-19. Betul?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Betul, Yang Mulia.

502. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul. Itu sudah kami ... udah kami kon ... apa namanya ... sudah kami verifikasi. Bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pemohon yang ... permohonan Bapak yang satu lagi, untuk file yang satu lagi. Bukti P-1 ... P-4 ... P-4.1 sampai dengan P-4.27. Betul?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya.

504. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sudah lengkap dan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian, bukti berikutnya yang berupa tambahan ini ada P-4.28 sampai dengan P-4.44. Benar?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

P4.50?

506. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti satu-satu dulu! Kan Bapak menyerahkannya pisah-pisah itu. Yang sampai 44 dulu, itu sudah lengkap. Benar, ya?

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, Yang Mulia.

508. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

Dari 45, kemudian dan P-7.45 dan P4 ... P-4.47, ya?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, Yang Mulia. Baik.

510. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul.

KETUK PALU 1X

Kemudian, ada tambahan bukti karena terpisah-pisah ini. P-4.46, ini sudah lengkap juga.

KETUK PALU 1X

Kemudian, P ... sori maaf ... yang tadi, yang Bapak beri tanda P-45 dan P-47 itu, itu buktinya belum ada pak, bukti fisiknya. Nanti tolong dilengkapi di belakang Pak, ya?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Bukti P-4?

512. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-4.45 dan P-4.47.

Jadi, yang lengkap itu P-4.46, P-4.48 sampai dengan P-4.50. P-4.46, P-4.48, sampai dengan P-4.50. Jadi, P-4.45 dan P-4.47 nya itu P-4.45, P-4.47-nya itu, itu belum ada.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik. Nanti kami (...)

514. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti di belakang, ya?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik.

516. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang itu belum bisa kami sahkan. Yang selebihnya P-46, P.48, sampai dengan P-50 itu kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Jadi, 2 itu yang bermasalah Pak, ya?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Sebenarnya yang lalu ini, Yang Mulia, kami sudah lengkapi di bawah. Mungkin masih (...)

518. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, terselip di mana itu?

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Ya, nanti nanti kita cek, Yang Mulia.

520. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan-jangan anu nih, pulau di Indonesia terselip di mana tuh, Ya, jadi itu mohon dilengkapi nanti, ya? Pak di belakang, ya? Kalau memang buktinya sudah ada ... Pak, lihat sini dulu! Jangan diajak ngomong dulu, Pak. Lihat kami sini dulu!

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Kemarin sebenarnya, Yang Mulia, kami sudah verifikasi. Nah (...)

522. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya ... yang memverifikasi itu kami, Pak (...)

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Oh, baik.

524. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang verifikasi itu kami.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Dibawa yang waktu dimasukkan itu, Yang Mulia.

526. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ya itu, makanya sekarang dikonfirmasi dulu di belakang. Tidak ada masalah kalau memang ada, jadi itu tetap nanti ini ... di ... dipakai yang peti ... yang kami sampaikan dulu karena ini akan disahkan, kan? Ya, itu. Nanti di belakang. Sehingga nanti kalau sudah Bapak verifikasi, bisa diserahkan berikutnya, begitu. Tujuannya itu. Ini agar kita tidak melanggar hukum acara. Begitu ya Pak, ya?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS H. RANTEALLO

Baik, Yang Mulia.

528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Permohonan selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Apakah sudah hadir? Ya, kami ... kita tunggu nanti sampai untuk ini selesai.

Kemudian dari pa ... dari PKS Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan, siapa yang akan jadi juru bicara? Ya. Silakan, Pak!

529. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Terima kasih, Yang Mulia.

530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, teruskan!

531. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Untuk Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia, yaitu untuk Dapil Sulawesi Tenggara VI. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera, mengajukan gugatan. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, kedudukan hukum dianggap dibacakan, tenggang waktu pengajuan Permohonan dianggap dibacakan. Untuk pokok Permohonan bahwa perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil VI adalah sebagai berikut.

Jadi, dari Dapil VI ini ada 3 kabupaten melebihi ... meliputi Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan. Kami menemukan adanya persoalan di 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Ada 3 persoalan utama, pertama, adanya penyalaha ... adanya kesalahan penjumlahan. Ini terjadi di TPS 1 di Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Landawe, Desa Tambakua. Dimana di C-1 nya di situ dijumlahkan ada suara dari Partai Bulan Bintang itu=52 suara, padahal seharusnya kalau dijumlahkan ke bawah, ada=22 suara.

532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu halaman berapa itu, Pak?

533. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

itu halaman 16, Bapak.

534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 16. Oke.

535. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

6 ... 16.

Jadi di situ kalau dijumlahkan di Partai Bulan Bintang di situ menurut Termohon, kalau kita lihat angka 1, 2, 5, 1, 4, 8, 1, ke bawah itu jumlahnya ada=5.231. Menurut Pemohon itu kalau ke bawah dijumlahkan angkanya hanya ada 22. Jadi, ada selisih di situ.

Yang kedua, adanya pengurangan untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Nomae, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe ini di halaman 10, Yang Mulia. Jadi kalau kita lihat di tabel tersebut, itu ada selisih suara dimana kalau menurut Termohon di DA-1, itu ada suara PKS ada 11 suara, padahal menurut Pemohon di C-1 ada 13 suara, di Situng KPU sendiri, di situngnya Termohon juga ada 13 suara. Jadi, ada sese ... selisih 2 suara.

Selain 2 persoalan tadi, ada selisih perhitungan yang bentuknya penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang yang terjadi di 27 TPS tersebar di 10 kecamatan, tersebar di 13 desa.

Pertama, di Kabupaten Konawe itu ada 108 suara yang ditambahkan kepada Partai Bulan Bintang, meliputi di Kecamatan Asinua di Desa Nekudu, Partai Bulan Bintang ditambahkan 2. Di Kecamatan Tongauna, Desa Monamai, ada 20 penambahan. Di Desa Besutulu ... Besulutu ... Kecamatan Besulutu ada penambahan 3. Di Desa Silea, Kecamatan Onembute, ada penambahan 16 suara. Di Desa Amne ... Amesiu, Kecamatan Pondidaha, ada penambahan 51 suara. Di Kecamatan yang sama, Desa Lalonggotomi ada penambahan 3 suara. Di Desa Walay, Kecamatan Abu ... Abuki ada penambahan 13 suara. Jadi total di Kabupaten Konawe ada penambahan 108 suara.

Kemudian, untuk Konawe Utara ... di Kabupaten Konawe Utara, ada penambahan yang kami total 143 suara, Yang Mulia. Itu meliputi di Kecamatan Lembo itu di Desa Puusiambu itu ada 24 suara. Di Desa Lembo sendiri ada 10 suara. Kemudian, Kecamatan Sawa, Desa Tudungano, ada 26 suara penambahannya. Di Desa ... di Desa Mata Benua, Kecamatan Landawe ada penambahan 10 suara. Terus, di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea ada 43 suara. Jadi kalau kita rekap, Yang Mulia, sebagaimana di halaman 18 ... total yang kami ajukan seperti itu.

536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada yang di Tambakua itu juga, ya?

537. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya, mohon maaf ada yang terlewat, Yang Mulia. Tadi seharusnya mengajukan renvoi dulu.

538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana?

539. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Mohon maaf sebelumnya, di halaman 13, Yang Mulia.

540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 13?

541. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Halaman 13, poin 4, Onembute, Silea. Kecamatan Onembute, Silea. Itu terketik yang tebal itu 26, padahal di atasnya 16, itu seharusnya 16, Yang Mulia.

542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

543. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Yang kedua, di halaman 14 hanya untuk mempermudah pembahasan, halaman 14, poin L, mulai dari kalimat ... kata-kata "bertambah 2 suara sehingga" itu kami coret. "Bertambah 2 suara sehingga" itu kami coret.

544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana itu, ya?

545. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Yang poin L (...)

546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

L? Akibat dari kesalahan rekapitulasi itu, itu betul?

547. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya. Bahwa akibat rekapitulasi it ... yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe mengakibatkan suara PKS berkurang 2 suara, sehingga jumlah suara PKS dalam DB-1 yang semula=11.783 bertambah 2 suara sehingga ... lah itu "bertambah 2 suara" kami coret, biar tidak menimbulkan interpretasi ganda.

548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh.

549. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya, langsung koma "seharusnya berjumlah" begitu (...)

550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

551. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

"Seharusnya berjumlah 11.785 suara", supaya tidak me ... apa ... mengakibatkan interpretasi ganda.

552. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, memang soal penafsiran memang aneh-aneh nanti. Ya, silakan!

553. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Terus halaman 18, Yang Mulia, ada typo. Di situ 212, seharusnya, Yang Mulia, itu 215.

554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana itu?

555. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Halaman 18, angka 8 (...)

556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Angka 8?

557. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

"Bahwa dengan demikian yang berhak atas kursi ke-6 Dapil VI Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah suara terbanyak 14.714 (...)

558. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya

559. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Suara, dengan selisih suara sebesar 215 suara."

560. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

215?

561. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya, terus kemudian halaman 19, Yang Mulia.

562. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya

563. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Halaman 19 tentang alat bukti, Yang Mulia. Bukti P ... P-2.4 Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kelurahan Besulaw Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe (...)

564. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Besulutu atau apa?

565. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Besulutu. Itu kami coret kelurahannya, karena itu menunjukkan kecamatan bukan kelurahan seharusnya.

566. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh.

567. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Jadi hasil situngnya untuk kec ... kecamatan, bukan untuk desa.

568. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi Besulutu itu ndak ada?

569. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Kami coret. Ya, Kelurahan Besulutu kami coret, Yang Mulia.

570. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

571. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Itu renvoi yang kami sampaikan, Yang Mulia.

572. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus Petitumnya?

573. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Terus untuk petitumnya ... di halaman 25, Yang Mulia.

574. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya

575. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan VI di daerah pemilihan sebagaimana berikut:
Perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara VI, parpol Partai Keadilan Sejahtera jumlah 14.714, Partai Bulan Bintang berjumlah 14.499
4. Menetapkan kursi keempat ... keenam di Dapil Sulawesi Selatan VI untuk Partai Keadilan Sejahtera.

576. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sulawesi apa?

577. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Oh, maaf. Mohon maaf, ini ikut direnvoi. Sulawesi Tenggara VI.

578. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti kursi orang diambil disini (...)

579. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Kursi orang diambil. Mohon maaf ikut direnvoi berarti yang ini, Yang Mulia.

580. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tenggara, ya?

581. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya, Sulawesi Tenggara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

582. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Sudah kami periksa dengan segenap alat buktinya. Cukup rapi. Kemudian ada bukti yang Anda sisipkan di sini di antara Bukti yang lama itu adalah P-1 sampai dengan P-15 itu, ya? Buktinya, ya?

583. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia.

584. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul?

585. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Betul, Yang Mulia.

586. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah kami verifikasi dan bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih.

587. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Mohon ... Mohon izin, Yang Mulia.

588. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa?

589. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Selain P-1 sampai dengan P-15, kami juga menyerahkan sebenarnya Bukti legal standing ada PA, PB yang terpisah dengan itu, Yang Mulia.

590. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Tambahan.

592. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana itu? Belum diserahkan?

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Sudah menyerahkan, Yang Mulia. Tadi (...)

594. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kapan menyerahkannya?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Sebenarnya ... kami menyerahkan sudah 2 kali, yang dulu ... karena kami juga tanda buktinya tidak memiliki, sehingga kami merasa susah membuktikan, gitu kan. Karena susah membuktikan, tadi kita juga menyerahkan itu untuk yang legal standing.

596. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami apa namanya ... kami konfirmasi ke belakang, belum ada itu.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Belum ada, Yang Mulia?

598. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti bagaimana statusnya itu? Ya, nanti (...)

599. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Kami ada tanda buktinya.

600. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti kalau memang ada, itu silakan nanti ... tentu harus kami verifikasi dulu.

601. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Siap.

602. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan nanti waktunya ... apa ... tidak boleh melampaui dari batas terakhir ketika Pihak Terkait, Termohon, atau Bawaslu itu menyampaikan Keterangan Perbaikan Permohonan. Itu batas terakhirnya, ya.

603. 529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Siap

604. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, nanti habis ini saya sarankan langsung koordinasi dengan Panitera atau PP di belakang, kalau memang itu ada. Kalau ... ya? Ya, nanti kita belakangan akan ini cek lagi.

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-0829/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

606. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Berarti untuk Partai keadilan Sejahtera sudah. Sekarang lanjut ke Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

607. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, siapa yang akan menyampaikan? Untuk Partai Nasdem (...)

608. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Partai Nasdem.

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari partai Nasdem.

610. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada renvoi, enggak?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Tidak ada, Yang Mulia.

612. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Bisa langsung ke pokok Permohonan, halaman 5.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Baik, Yang Mulia. Pokok Permohonan Provinsi Sulawesi Tenggara persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten ... Kabupaten Buton Selatan, Daerah Pemilihan Buton Selatan III. Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil III, Kecamatan Lapandewa, Batu Atas pada pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel pertama, tabel 1 perolehan suara.

1. Parpol PDIP perolehan suara=2.093.
2. PKS=1.632.

614. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Nasdem saja, Pak. Nasdem terus (...)

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Nasdem=103.

616. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nasdem yang dipersoalkan apa ini?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Kursi ke-5, Yang Mulia.

618. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Nasdem=1.000 (..)

620. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.037.

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

1.037. Gerinda=1.012

622. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.012.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Bahwa kuota kursi dapil 3 Kecamatan Lapandewa Batu atas adalah sebanyak=5 kursi. Bahwa waktu pemungutan suara pada tanggal 17 urutan partai mempunyai kursi ... sudah dianggap dibacakan.

624. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Santai saja, Pak. Enggak usah buru-buru.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Bahwa suara Pemohon yaitu kursi Partai Nasdem sejumlah=1.037 suara, suara menduduki kursi ke-5, kursi terakhir sedangkan kursi yang terkait dalam hal ini partai Gerinda sejumlah=1.012 tidak mempunyai kursi.

Bahwa dalam data pemilih dalam DPT adalah sebanyak=219, jumlah pemilih DPTb adalah nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah nihil dan pengguna hak pilih dalam DPT adalah sejumlah=152, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb adalah nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah=4.

Poin 5 bahwa jumlah pemilih disabilitas terdapat dalam DPT, DPTb, dan DPK, adalah nihil. Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah nihil bahwa pada saat acara pemilihan sua ... sua ... suara tanggal 17 April 2019 diketemukan 2 orang pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 6 Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas oleh Paswas ... Pawascam kecamatan Batu Atas.

Bahwa atas salah alasan tersebut, Pawascam Kecamatan Batu Atas mengeluarkan surat terkait rekomendasi untuk diadakan pemilihan

suara ulang di TPS 6 Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas, yaitu pada tanggal 27 April 2019. Bahwa setelah pemilihan suara ulang pada tanggal 27 April 2019 terjadi perubahan perolehan suara sebagai berikut.
Pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pemilihan suara ulang.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Direnvoi, Yang Mulia.

628. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemungutan?

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya. Pemungutan.

630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau penghitungan malahan? Tidak? Jangan salah!

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pada penghitungan suara ulang ... surat suara ulang, pemungutan suara ulang (...)

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, direnvoi, Yang Mulia.

634. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau pemilihan (...)

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Penghitungan suara ulang.

636. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemilihan umum ulang jadi. Pemilu ulang jadi dimintanya. Jadi, pemungu ... penghitungan atau pemungutan, ya? Pemungutan yang benar?

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, pemungutan saja, Yang Mulia.

Tabel 3, perubahan perolehan suara berdasarkan surat ketetapan partai, Gerindra bertambah menjadi=1.090, Nasdem=1.056.

638. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nasdem=1.056.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Bahwa kenaikan suara Termohon Partai Gerindra pada pemungutan suara (...)

640. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, ya. Ini tadi, kan Anda mendalilkan di angka 3 tadi?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

642. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba diperhatikan. Partai Nasdem berjumlah=1.037 suara, menduduki kursi ke-5, kursi terakhir. Sedangkan kursi yang terkait dalam ini Partai Gerindra berjumlah=1.012 tidak memperoleh kursi.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

644. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa persoalannya di sini, kalau begitu?

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Penggunaan suara disabilitas, Yang Mulia.

646. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, ini kan=1.012 tidak mendapat kursi?

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

648. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.037, Nasdem dapat kursi?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Kursi ke-5, Yang Mulia.

650. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persoalannya apa gitu loh?

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Adanya pemungutan suara ulang karena adanya (...)

652. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Diketemukannya (...)

654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ditemukan apa? Ini kan (...)

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

2 orang pemilih, diadakan PSU, Yang Mulia.

656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, merugikan suara Nasdem?

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Nasdem. Ya.

658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 2 suara itu? Dua orang pemilih ini?

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Akibat 2 pemilih tadi ... di ... apa ... di PSU, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Ya.

661. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

jadi, menurut Anda PSU-nya itu yang seharusnya tidak ada, begitu? Atau bagaimana?

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Bukan, Yang Mulia. Di pemungutan suara ulang, pemakaian DPT itu kan, dari awal itu mesti sama, Yang Mulia. Kalau disabilitas 2

tetap=2, tapi di pemungutan suara ulang, memakai DPT disabilitas bertambah, Yang Mulia. Jadi, hampir=20 yang pakai, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Seharusnya cuma 2 yang DPA disabilitas, di PSU pertama, tetapi di PSU kedua bertambah jadi 20 orang yang memakai surat suara disabilitas.

664. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Disabilitas?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

666. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, terus suara dari (...)

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Gerindra menaik ... langsung naik, Yang Mulia.

668. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Naik 1.090 ini?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

670. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang cacat bertambah, begitu?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

672. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu maksudnya?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia. Yang disabilitas cacat banyak pemakainya.

674. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau memang segitu jumlahnya, bagaimana? Kalau pada awal misalnya tidak menggunakan (...)

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Termohon, Yang Mulia.

676. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya ... ya. Nanti itu lah.

677. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Apalagi yang menjadi dalil yang krusial apa?

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Itu saja sih, Yang Mulia. Saya langsung ke Petitem, Yang Mulia.

679. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Petitem.

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 1 TPS, yaitu pada TPS 6 Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Atau Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, mintanya (...)

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

1 TPS saja, Yang Mulia.

683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PSU yang dium ... yang di PSU, begitu kan nanti?

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Nanti dipertimbangkan. 6 TPS, ya? 3 ... TPS 6, desa?

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Batu Atas (...)

687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya 1 TPS, ya?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia. Yang dipakai disabilitas=25.

689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Nanti tambah lagi disabilitasnya kan repot ini.
Baik, nanti dipertimbangkan oleh Mahkamah.

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia.

691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Catatan kami tidak ada hanya memang penekanannya pada minta PSU di 1 TPS tadi. Mungkin selebihnya mengenai alat bukti, Pak Ketua.

692. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Ini agak unik juga sih, ada pertambahan itu tadi yang lalu minta di PSU lagi itu. Alasannya karena apa? Karena yang disabilitas bertambah.

Ya, pertama saya ingin konfirmasi dulu kepada Saudara Kuasa. Ini ada 2 orang yang tidak tanda tangan dalam Permohonan ini. Heriyanto Citra Buana dan Ridwan Syaidi Tarigan.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Dicoret, Yang Mulia. Dianggap dicoret.

694. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dicoret?

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

696. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, dia tidak jadi ... tidak lagi jadi kuasa?

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

698. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak lagi jadi kuasa untuk seluruhnya atau untuk yang di sini ... yang di perkara ini saja?

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Perkara Buton Selatan III saja, Yang Mulia.

700. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang ini saja?

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

702. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, dia tidak ikut, ya?

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

704. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti, kalau ada yang protes soal honor, Anda yang tanggung jawab itu, ya. Karena tidak diikuti.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

706. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Buktinya kami periksa, lengkap dan cocok. Cuma pengkodeannya agak aneh itu. Saudara baca enggak lampirannya ininya ... lampiran apa yang ya itu loh? Orang belum saya sampaikan ini.

Saya ... maksudnya Lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2018 itu kan ada cara memberikan buk ... kode bukti untuk Pemohon, P sekian. P-nya benar tapi Anda tanaman ... Anda tambahkan P Nasdem berapa itu kan? P-Nasdem-1, P-Nasdem-3.

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Banyak ininya ... bukti-bukti. Kami dari DPP pakai kode, Yang Mulia.

708. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari DPP yang kasih kode itu?

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, P-1 Nasdem.

710. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, DPP-nya enggak baca PMK berarti itu.

Ya, itu. Tapi isinya oke, gitu lho benar. Nanti ... jadi bisa kami sahkan. Jadi, Anda menyerahkan bukti P ... yang diberi tanda P-1 Nasdem sampai P-3 Nasdem dan P-1 Nasdem (Buton Selatan III) sampai dengan P-4 Nasdem Buton Selatan III. Betul itu buktinya, ya? Betul.

Baik. Ya, dengan demikian, disahkan.,

KETUK PALU 1X

Tetapi, nanti tolong dikoordinasi ke belakang dengan pengkodean itu lagi, ya!

Ya, ininya sudah diperbaiki sajalah itu. Nanti ada P-Nasdem ini. Nanti ada penafsiran lain lagi nanti.

Ya, tidak dipikir tentang bukti nanti itu. Baik, terima kasih dari Nasdem sudah selesai. Sekarang dari Perindo Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sudah siap?

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Siap, Yang Mulia.

712. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin ... Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu yang ini.

713. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami ingin mengajukan renvoi, Yang Mulia.

715. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, renvoinya banyak, enggak? Bisa sekalian langsung pada waktu sambil baca ndak? Atau kalau banyak (...)

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Soalnya loncat-loncat, Yang Mulia.

717. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hah?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Enggak, maksudnya kan kita membacakan pokok-pokoknya saja nanti.

719. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu?

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

721. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, sekarang direnvoi?

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya, begitu.

723. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, boleh ... boleh.

724. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang direnvoi yang di pokok-pokoknya juga?

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Enggak, Yang Mulia. Ada yang di awal ada yang (...)

726. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya ... ya. Silakan!

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Yang di halaman 7, Yang Mulia.

728. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 7.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Poin 5. Yang daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua itu diganti Kabupaten Konawe, Kepulauan I, Sulawesi Tenggara, Yang Mulia.

730. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kabupaten Konawe, ya?
Kabupaten Konawe?

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Kepulauan I, Sulawesi Tenggara.

732. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kan ada Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara kan ada di sana itu. Ini Konawe Kepulauan, ya?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya, Yang Mulia.

734. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Kemudian, di halaman 19 poin 9.

736. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halamannya di sini. Ya?

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Poin 9 yang di alinea awal.

738. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Yang berlangsung di Kecamatan Wawo Indah itu seharusnya di Wawonii Tengah, Yang Mulia.

740. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh. Wawonii Tengah, ya? Ya, Wawonii, ya? Ya?

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Di halaman 25.

742. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 25, ya?

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Di awal itu Pemohon sudah mengadukannya ke Gakkumdu, itu dicoret menjadi Bawaslu, Yang Mulia. Yang Gakkumdu menjadi Bawaslu.

744. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pemohon sudah mengadukannya ke Bawaslu?

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

746. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kan ada du ... di bawahnya lagi ada Gakkumdu lagi?

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya, Gakkumdu jadi Bawaslu, Yang Mulia.

748. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bawaslu semua. Ya.

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya. Itu saja, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Silakan pada pokok Permohonan saja!

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya. Kami mengajukan mengenai identitas Pemohon, Kewenangan Majelis ... eh Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, tenggang waktu, itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

752. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Langsung ke pokok per ... pokok Permohonan. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera, pada TPS 001 Desa Wawo Indah, dari 12 suara yang dimanipulasi oleh Termohon menjadi sebanyak 20 suara.

754. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Dan pada TPS 1 Desa Lampe Api Baru dari 31 menjadi 32 suara sebagaimana tabel 411 dan tabel 412 yang dilakukan oleh Termohon tanpa pernah ada klarifikasi serta paraf dan pemberian keterangan secara terbuka dari Termohon terkait dengan diubahnya perolehan suara dari Partai PKS tersebut.

756. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Dan bahkan perubahan perolehan suara Partai PKS atas rekapitulasi dari tingkat kecamatan berdasarkan Form C-1 ke tingkat kabupaten berdasarkan Form DA-1 tidak disertai dengan paraf atau tanda tangan Termohon.

758. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

759. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Sehingga, terjadi kecurangan karena telah merugikan Pemohon dan mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai PKS yang dilakukan Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam tabel 41.3 tersebut sangatlah tidak transparan dan tidak terbuka, sehingga Pemohon menolak hasil perolehan suara Partai PKS tersebut sesuai dengan tabel.

760. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Tadi tabel 41.3?

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya, Yang Mulia.

762. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terus!

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Bahwa pada faktanya, antara Form C-1 salinan yang dipegang oleh Pemohon dengan Form C-1 hasil rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi perubahan data perolehan suara oleh Partai PKS. Namun, Termohon tidak pernah memparaf dan membuat Berita Acara yang disetujui oleh para saksi yang hadir di TPS 001 Wawo Indah dan TPS (...)

764. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Wawonii tadi, udah bukan Wawo Indah lagi, kan? Wawonii tadi. Tadi di namanya itu Wawo ... Wawonii. Ada Kelurahan Wawo Indah?

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Wawonii Indah itu kecamatan, Yang Mulia. Wawo Indah itu desanya di TPS.

766. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh. Desa dan Kelurahan Wawo Indah?

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Desa Wawo Indah, ya.

768. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Yang ... ya ... tidak pernah memparaf dan membuat Berita Acara yang disetujui oleh para saksi yang hadir di TPS 001 Wawo Indah dan TPS 1 Lampe Api Baru atas perubahan data yang dilakukan tersebut. Sehingga, tindakan Termohon

yang tidak memparaf perubahan data tersebut merupakan tindakan kesengajaan yang menguntungkan perolehan suara dari Partai PKS dan hal tersebut telah melanggar Ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (1) huruf e.

Sehingga akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak yang telah diuraikan tadi, maka membuat perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan 1 yang seharusnya berjumlah 462 suara menjadi 471 suara. Kemudian, jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan 1 adalah sebanyak 470 suara.

770. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Sehingga, jumlah perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan 1 ... kursi ... adalah sebanyak 7 kursi yang dapat dihitung sebagai diuraikan pada tabel 4.1.5, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini tabelnya 4.1.5, ya.

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

774. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah?

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya. Sudah, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Kami langsung ke Petitem.

778. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ke Petitem?

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

Poin 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

780. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Poin 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 [sic!] dan seterusnya, dianggap dibacakan. Sepanjang di daerah Pemilihan Konawe Kepulauan 1, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pemilihan Konawe Kepulauan I, di TPS 001, Desa/Kelurahan Lampeapi Baru dan TPS 1, Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah.

782. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Kabupaten Konawe, Kepulauan ... Provinsi Sulawesi Tenggara.

784. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Konawe Kepulauan, ya!

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

786. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kan namanya Konawe Kepulauan, ya?

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Poin 3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 001, Desa Lampeapi Baru dan di TPS 1, Desa Wawo Indah di Dapil Konawe Kepulauan I, Kabupaten Konawe Kepulauan.

788. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan Konawe Kepulauan I. Sebagai berikut.

Poin 414. Perolehan suara Pemohon.

1. TPS 1, daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1, di Desa/Kelurahan Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Partai Keadilan perolehan suara=12, dan di TPS 01, daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1 di Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Partai Keadilan Sejahtera=31.

790. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Menetapkan perolehan suara seluruhnya bagi Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, di Dapil Konawe Kepulauan I. Sebagai ... terdapat dalam tabel, Yang Mulia.

792. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Poin 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan ini. Atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

794. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

Ada berapa catatan ini? Enggak ada ya, enggak ada ya kesalahan perhitungan itu.

Ya, petitum ya sudah. Tinggal bukti, ya? Silakan, Pak Ketua!

795. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Saudara menyerahkan bukti P-1 sampai dengan P-21, ya? Ya?

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Betul.

797. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu sudah kami verifikasi dan tidak ada masalah. Jadi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk (...)

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Yang Mulia.

799. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Kami ingin mengajukan bukti tambahan.

801. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti tambahan apa lagi ini?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Bukti tertulis dan ada rekaman, Yang Mulia.

803. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Rekaman?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

805. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh saja. Tapi ya itu tadi batasannya sama dengan Pemohon yang tadi, dari PKS kalau ndak salah itu. Jangan sampai melewati batas ketika Pihak Terkait ... Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu, menyampaikan perbaikan permohonan yang nanti akan dibacakan pada akhir persidangan. Jadi, (...)

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Baik, Yang Mulia.

807. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begitu, ya?

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Jadi, diajukan di bawah, Yang Mulia?

809. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, di bawah. Nanti di di ... untuk diverifikasi dulu.

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Baik, Yang Mulia.

811. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi batas waktunya kalau melewati itu Anda baru menyampaikan, tidak akan kami terima.

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Baik, Yang Mulia.

813. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD CHAIDIR

Ya.

815. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, dari Partai Berkarya. Apakah sudah ada yang datang? Petugas? Tidak ada? Masih tidak ada kabar sampai sekarang? Wah, ini dari Partai Berkarya ada beberapa kali sudah tidak datang walaupun sudah kami panggil secara patut. Baiklah nanti Mahkamah akan mempertimbangkan tersendiri untuk ini.

Selanjutnya, dari Partai Persatuan Pembangunan. Mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

Siapa yang jadi juru bicara? Silakan, Pak!

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

817. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Untuk identitas Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Terus Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga kami anggap juga dibacakan. Selanjutnya, pada kedudukan hukum atau legal standing Pemohon juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Termasuk juga tenggang waktu pengajuan permohonan, Yang Mulia, kami juga anggap dibacakan.

819. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar Pak. Kuasa Hukum ini. Sebentar dulu, sabar dulu.

Ada masalah yang serius ini. Ini perkara nomor? 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini ada surat penarikan dari DPP. Gimana ini?

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Yang Mulia.

821. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Surat dari DPP itu sampai saat ini kami tidak terima, Yang Mulia.

823. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Mahkamah sudah menerima.

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya.

825. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya konfirmasi.

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Tapi kami sudah mengajukan permohonan atau menyurat ke DPP untuk minta persetujuan untuk (...)

827. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi persetujuannya belum turun?

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ndak dikasih, Yang Mulia.

829. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ndak dikasih? Tapi justru mencabut? DPP ini mencabut. Bapak mau lihat? Ada surat.

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Kami tidak dikasih itu, Yang Mulia.

831. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Mahkamah mendapatkan. Bapak mau lihat tidak? Kalau tidak cukup saya jelaskan.

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Boleh, Yang Mulia.

833. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena memang Permohonan ini sifatnya perorangan.

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Siap.

835. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kami tidak bisa membatasi juga bahwa kemudian Bapak juga harus me ... mencabut. Bukan begitu maksud kami. Kami cukup cross saja. Tapi yang jelas, syarat untuk mengajukan Permohonan bagi perorangan adalah rekomendasi.

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Betul, Yang Mulia.

837. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu syarat absolut, Pak.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Baik, Yang Mulia.

839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kalau Bapak tetap memaksakan prinsipal mengajukan itu, kami juga tidak bisa melarang. Tapi yang harus diingat bahwa syarat rekomendasi itu dengan sendirinya tidak ter ... tidak tercukupi, kan? Karena ada tidak terpenuhi. Dan memang Bapak sudah mengakui sendiri bahwa surat itu tidak didapatkan, ya?

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya, Yang Mulia. Padahal surat (...)

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Kami sudah (...)

843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Bapak sekarang tetap mau mengajukan ini? Mewakili prinsipal Bapak?

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Kami akan tetap mengajukan, Yang Mulia. Karena (...)

845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik (...)

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Kami tidak mau hak konstitusi kami hanya persoalan rekomendasi (...)

847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kami ... kami tidak mempersoalkan itu. Kami hanya mengklarifikasi surat ini dulu.

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Siap, Yang Mulia.

849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, surat ini meskipun ada dari DPP menarik, tapi secara pri ... individu tetap mengajukan, meskipun akhirnya tanpa persetujuan atau rekomendasi itu?

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Siap, Yang Mulia.

851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Baik. Nanti kami catat dan kami pertimbangkan. Sekali lagi bahwa untuk menjadi concern Pihak Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait bahwa meskipun syarat untuk mendapat rekomendasi merupakan syarat mutlak, merupakan bagian syarat formil dalam baga ... bagian mengajukan sebuah Permohonan, tapi karena prinsipal dan kuasa hukum tetap akan mengajukan, nanti direspons saja di jawaban Anda. Baik. Silakan, Pak, dilanjutkan, Pak!

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut.
Pada pokok Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Nomor 181/PL.01.4-PU/7412 dan seterusnya, tentang Penetapan Pendaftaran Calon Tetap atau DCT. Jadi, kami renvoi langsung, Yang Mulia, ya?

853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

DTC apa DCT?

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

DCT. Tertulis DTC.

855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

DCT, oke.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya. Kami renvoi, Yang Mulia.

857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Anggota DPR Kabupaten Konawe Kepulauan pada pem ... pada Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Pemohon adalah calon anggota DPR Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil II Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 4, Bukti P-10, telah melaporkan temuan atau dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh karena adanya pemilih atas nama Arnilah. Terdapat pada TPS 003 DPT Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara memberikan hak pilihnya di TPS 1 Desa Wakadawu, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa salinan fotokopi, Salinan e ... e-KTP atas nama Arnilah NIK 74 dan seterusnya alamat Desa Wakadawu, Kecamatan Wawonii Timur dan hasil screen-out identifikasi pemilih melalui program KPU RI tahun 2019 yang di dalamnya memuat bahwa pemilih telah terdaftar di TPS 003 DPT Kelurahan Molawe, Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tertuang dalam formulir pengaduan Form 1P dan seterusnya pada halaman 3 poin 2, Bukti P-3.

3. Bahwa berdasarkan laporan Pemohon diterima oleh Panwas Kecamatan Wawonii Timur yang dijadikan sebagai dasar penelurusan untuk mengumpulkan keterpenuhan bukti sebagai dasar untuk menindaklanjuti suatu temuan, dilaporkan sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi pemungutan suara ulang PSU Nomor 019/K.PANWAS-Konkep-04/PM.00/IV/2011 pada halaman pertama nomor 2, uraian kronologis, poin 1, yaitu Bukti P-2. Bahwa pada hari yang dit ... sama pada diterima laporan Pemohon waktu pelaksanaan Rapat Pleno PPK di Kecamatan Wawonii Timur sesuai dengan jadwal pembukaan kotak suara sesu ... Panwaslu Kecamatan Wawoni Timur telah memeriksa daftar hadir pemilih Salinan Formulir Model C-7. Dan seterusnya. Di TPS 01 Desa Wakadawu dan di dalamnya memuat nama Arnilah tercatat sebagai pemilih kategori daftar pemilih khusus atau K ... pemilih khusus pada nomor urut 13 kategori pemilih DKP dan memberikan hak pilihnya di TPS 01 Desa Wakadawu. Berdasarkan klarifikasi ketua (...)

859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wakadawu.

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

KPPS 01 Desa Wakaduwu pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 17 April 2019 pada hari pelaksanaan perhitungan suara, pemilih memberikan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wakadawu yang memberikan surat suara sebanyak 5 ... 3 lembar. Sebanyak 5 lembar pada setiap jenis surat suara, pemilih yang seharusnya me ... memilih hanya dapat diberikan 4 jenis surat suara pemilihan, yaitu surat suara ... kami renvoi di sini, Yang Mulia. Itu pemilihan presiden dan wakil presiden, tersingkat di sini, Yang Mulia.

861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PPWP itu?

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya. Jadi kan langsung pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD ... ini ada juga DPD ... DPD ... DPR RI, DPD ... jadi kami garis, Yang Mulia, DPD-nya, Yang Mulia. Lanjut DPR provinsi (...)

863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dicoret?

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya, dicoret, Yang Mulia.

865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus? Yang kabupaten enggak ada?

866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ndak, ndak ada kabuatennya karena 4 surat yang harus diberikan, Yang Mulia.

867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ini ditanya makanya (...)

868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Makanya seharusnya tidak diberikan memang, Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kabupaten/kota enggak ada, ya?

870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya. Namun harus memiliki surat suara pemilih pindahan. Bahwa berdasarkan fakta, bahwa keterangan sebagaimana diuraikan pada poin 2 dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 37 ... 372 ayat (1) huruf d bahwa pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilihan Tambahan dan peraturan ... dan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 99 ... Tahun 9 ... Tahun 2019, perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun seribu ... Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang ... suara dalam pemilihan umum pada Pasal 6 ... 65 ... ayat (2) huruf d, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang penga ... Pengawasan Pemungutan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum pada Pasal 18 ayat (2) huruf d.

871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal ... harusnya pasal dulu, Pak, kalau menyebut ini. Ini Pasal 372 ini apa ini? Pasal penggelapan apa? Pasal sekian, undang-undang nomor sekian. Jadi ... ayo lanjutkan! Angka 7? Atau dianggap diba (...)

872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Anggap di (...)

873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, dibaca semua ini?

874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Oke, Yang Mulia. Kami pada prinsipnya (...)

875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung persandingan itu, Pak! Konteksnya kan di situ.

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Satu saja lagi, Yang Mulia.

877. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pemeriksaan penelitian terhadap temuan yang dilaporkan pelapor, berkesimpulan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Wawonii Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan guna melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU pada TPS 01 Desa Wakadawu, Kecamatan Wawoni Timur. Sebagaimana Bukti P-5. Lanjut, Yang Mulia, pada (...)

879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persandingan? Yang mana?

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Kami tidak ada bukti sandingan, Yang Mulia.

881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini, 4.1? 4.1 ini bukan persandingan? Ini kan esensinya di situ toh, Pak. Ini kami beri kesempatan Bapak jauh-jauh dari (...)

882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

4.1 bukan sandingan, Yang Mulia.

883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Jadi, peroleh ... perolehan yang didapat suaranya Pemohon.

885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi apa kata depannya apa? "Persandingan" gitu kok. Bapak nih gimana sih?

886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Jadi bukan pada prinsipnya persandingan, Yang Mulia.

887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terserah. Apa mau dicoret ini kata ini? Terus semangatnya apa kalau esensi yang mau disampaikan kalau persandingan enggak di ... enggak diakui.

888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya, yang kami (...)

889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksudkan? Apa?

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Perolehan suara, Pak, baik pada kami maupun pada KPU, Pak.

891. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Begitu maksudnya, Yang Mulia.

893. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bacakan, Pak!

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Oke. Saya langsung ke Petitum, Pak.

895. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Petitum. Oke.

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ... seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU ... keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor sekian sekian dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pemilih daerah kabupaten sepanjang Daerah Pemilihan Dapil II Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Wawonii Timur.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan Dapil II, TPS 01 Desa Wakadawu, Kecamatan Wawonii Timur berdasarkan rekomendasi panwascam nomor sekian sekian.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini, jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami dari Kuasa Hukum, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

897. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pem ... pemilihan ulang?

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Pemilihan ulang, Yang Mulia.

899. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan pemungutan suara ulang, Pak?

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya.

901. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang mana? Ya, semua ini.

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Pemilihan suara ulang, Yang Mulia.

903. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemilihan ... bukan pemungutan suara ulang?

904. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Pemungutan suara ulang.

905. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini Bapak buru-buru sih. Pemungutan.

906. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Jadi kan diambil dari bahasa panwascam, itu memerintahkan PSU.

907. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

908. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Pemilihan suara ulang.

909. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Panwascam Ko ... Konawe itu bukan?

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Wawonii.

911. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, baik. Ini ... ya, catatan kami tidak ada untuk ... kecuali hanya rekomendasi, Pak, itu kalau memang Bapak bisa menyelesaikan dengan baik dengan pihak DPP itu, sebelum ... apa ... ada jawaban dari pihak para Pihak Termohon dan Pihak Terkait, ya? Nanti Mahkamah akan pertimbangan. Tapi kalau sampai nanti tidak didapatkan ya, supaya diberi pengertian kepada prinsipal. Kan, itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan syarat formil untuk mengajukan Permohonan itu.

Bukti, Pak Ketua. Mohon, silakan!

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Sebelum ... izin, Yang Mulia. Sebelum melangkah ke rekan yang lain sebagaimana teman-teman juga mau menambahkan bukti surat, kami juga ingin juga menambahkan bukti surat. Salah satunya adalah

Permohonan kami ke DPP untuk minta rekomendasi, itu kami ajukan sebagai bukti nanti, Yang Mulia.

913. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu salah satunya?

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Siap.

915. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada salah 2 lagi ndak, Pak? Ndak?

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Rekaman-rekaman WA yang kami juga ajukan, bagaimana intensnya kami berkomunikasi untuk bisa kami dikasih rekomendasi.

917. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Rekaman WA?

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya.

919. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan sampai percakapan utang piutang, ya?

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

921. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh itu nanti disampaikan, tapi kondisinya catatan Termohon sudah mencatat semua, juga Bawaslu dan Pihak Terkait bahwa tadi kami sudah tegaskan bahwa Perkara ini tidak ada rekomendasi dari DPP, tapi

Pemohon kami tidak bisa menghalangi haknya untuk mengajukan Permohonan. Dan ada juga surat dari DPP Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan bahwa menarik Permohonan itu kondisinya. Tapi beliau menyampaikan bukti yang saya sahkan dan nanti akan ditambah nanti. Yang ada dulu ya, Pak?

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Ya.

923. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak menyampaikan P-1 sampai P-10, betul?

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Siap, siap.

925. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu sudah kami periksa dan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Nanti untuk tambahannya berlaku juga seperti Pemohon yang lain kalau mau disampaikan, yaitu Bapak tidak boleh lewat dari batas waktu ketika Termohon dan Pihak Terkait atau Bawaslu menyampaikan perbaikan Permohonan. Kapan itu, nanti di akhir persidangan akan kami sampaikan, begitu Pak, ya?

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG

Siap.

927. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Tolong mumpung sudah siap, tolong dimatikan, miknya dimatikan dulu. Nah, supaya yang lain bisa menyala nanti.

Baik. Dengan demikian, maka untuk Permohonan dari PPP tepatnya dari Bapak Irpan ini sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan

dengan Permohonan dari Partai Gerindra Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Siapa yang jadi juru bicara? Ya, silakan!

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Sebelum kami membacakan pokok Permohonannya, izinkan kami akan menyampaikan renvoi dalam Permohonan pada halaman 11.

929. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman berapa?

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Halaman 11.

931. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 11?

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Baris ke-3.

933. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baris ke-3 dari atas atau dari bawah?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Dari atas.

935. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari atas. Apa yang diperbaiki?

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Itu tertulis 23, salah ketik itu sebenarnya adalah 32.

937. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

32? Wah, ini tukar-tukar ini begini. 32?

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

939. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Terus, di halaman 12.

941. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

12.

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

He eh, di baris ke-3 dari atas.

943. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baris ke-3 dari atas.

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya. Itu seharusnya Kabupaten Muna, kami renvoi, Yang Mulia, dari Kota Binjay jadi Kabupaten Muna.

945. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini dari Sulawesi loncat ke Sumatera. Tadi dari Maluku atau Sulawesi loncat ke Papua.

946. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

947. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang Muna, ya? Kabupaten, ya?

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, Kabupaten Muna.

949. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kabupaten Muna.

950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

951. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dapil?

952. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Dapil VI.

953. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Muna Dapil VI.

954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, terus pada petitemnya juga, Yang Mulia. Pada angka 2 Kabupaten Muna Dapil 1 seharusnya Dapil VI.

955. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang angka 2 berapa?

956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Petitum angka 2.

957. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kabupaten Muna itu harusnya Dapil VI, ya?

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

959. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Di angka 3 juga menjadi Dapil VI, bukan 1.

961. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Terus petitum angka 6 itu seharusnya angka 4, Yang Mulia.

963. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

964. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Petitum angka 6 itu harusnya angka 4, Yang Mulia.

965. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Anda menelan 2 urutan lagi dari 3 langsung ke 6.

966. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

967. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, silakan sampaikan pokok-pokoknya apa yang jadi masalah.

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan bacakan mengenai kewenangan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum dianggap dibacakan. Tenggang waktu dianggap dibacakan. Pokok Permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Dapil Kolaka Utara 1, ini yang internal, Yang Mulia.

969. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gimana?

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Internal.

971. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya. Saya tanya dulu ada rekomendasi atau ndak?

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ada, Yang Mulia.

973. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul?

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ada.

975. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada rekomendasi?

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ada.

977. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, silakan terus!

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Bahwa perolehan suara setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS perolehan suara keseluruhan Pemohon adalah sebanyak=964 suara dan perolehan suara caleg lain atas nama Ahmadi, S.E. sebanyak=952 suara. Bahwa ternyata setelah dilakukan rekapilo ... rekapitulasi hasil pemungutan suara pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Latusua Kecamatan Latusua maksudnya di sini Kecamatan Latusua juga dan TPS 7 Desa Patuwana Kecamatan Lasusua Kolaka Utara yang kemudian ternyata terdapat rekomendasi dari Panwascam Lasusua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua. Dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan C-6 milik orang lain.

Akan tetapi, siapa pemilih yang menggunakan C-6 yang bukan miliknya tersebut, meskipun hal demikian merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi belum ada dan/atau tidak ada tindakan hukum yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan hak pilih bukan ... bukan miliknya tersebut.

Bahwa Pemohon dan caleg lainnya dari dan partai lainnya sangat keberatan dan telah membuat pernyataan keberatan tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, serta penolakan pemilihan suara ulang ... Pemung ... Pemilihan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua.

Atas keberatan dan penolakan tersebut sama sekali tidak diperhatikan dan KPU Kabupaten Kolaka Utara tetap melaksanakan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 3, TPS 9 Kelurahan Lasusua, dan TPS 7 Desa Patowonua pada tanggal 27 April 2019.

Dengan tetap dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS 3, TPS 9, Kelurahan Lasusua, dan TPS 7 Desa Patowonua. Faktanya juga ditemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan suara ulang tersebut. Dimana pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan e-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C-6 ataupun A-5.

Bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut, Pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan penerimaan laporan pada Formulir B-1.

Lanjut ke angka 12 halaman 8, Yang Mulia.

979. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Akan tetapi, hingga saat ini laporan dan/atau pengaduan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti dan hingga saat ini tidak ada pemungutan suara ulang di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil I.
3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara. Atau,
4. Menetapkan hasil perolehan ... perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil ... Dapil I atas nama ... sebagaimana data persandingan, dianggap dibacakan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kabupaten Muna.

981. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Dapil VI.

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pleno Kabupaten Muna, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 589 suara, dan perolehan suara caleg lain atas nama Muhammad Ilham Tang, SKM adalah sebanyak 596 suara. Perolehan suara caleg atas nama Muhammad Ilham Tang ... Muhammad Ilham Tang diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C-1 di 7 TPS Desa Mato ... Mantobua, Kecamatan Lohia dengan DA-1.

Berdasarkan rekapitulasi DA-1 Desa Mantobua, perolehan suara Muhammad Ilham Tang tercantum sebanyak 33 suara. Sedangkan, perolehan suara berdasarkan rekapitulasi C-1 pada 7 TPS adalah: TPS 1 sebanyak 4 suara, TPS 2 sebanyak 2 suara, TPS 3 sebanyak 7 suara, TPS 4 sebanyak 1 suara, TPS 5 sebanyak 9 suara, TPS 6=0 suara, TPS ... TPS 6.

983. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebanyak berapa?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, TPS 6=4 suara.

985. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

4? Jadi, Ada renvoi itu?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

987. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok mau memotong suara Anda sendiri, bagaimana ceritanya itu?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, ini kesalahan ... kesalahan.

989. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Suara dengan total perolehan suara sebanyak 29 suara. Sehingga, terjadi penambahan (...)

991. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berapa totalnya?

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

27.

993. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi 29 bacanya.

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

27. maaf, Yang Mulia. Salah tulis. 27.'

995. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Awas berubah lagi lho!

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Kurang kopi, Yang Mulia.

997. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terus!

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 6 suara. Perolehan suara caleg atas nama Muhammad Ilham Tang diduga adanya penambahan atau penggelembungan suara terdapat yang terdapat perbedaan perolehan antara C-1 di 5 TPS Desa Liangkobori, kenyam ... Kecamatan Lohia dengan DA-1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA-1 di Desa Liangkobori, perolehan suara Muhammad Ilham Tang tercantum sebanyak 32, yang tadi kami renvoi, Yang Mulia.

999. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah tadi itu.

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Sedangkan perolehan berdasarkan C-1 pada 5 TPS adalah TPS 1 sebanyak 6 suara, TPS 2 sebanyak 1 suara, TPS 3 sebanyak 5 suara, TPS 4 sebanyak 2 suara, TPS 5 sebanyak 8 suara. Dengan total perolehan suara sebanyak 22 suara sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 10 suara. Perolehan suara atas nama Muhammad Ilham Tang telah diduga adanya penambahan atau penggelembungan, terdapat perbedaan perolehan suara antara C-1 pada 3 TPS De ... Desa Lagasa, Kecamatan Duruka dengan DAA-1.

1001. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kira-kira modelnya samalah, ya?

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, kurang lebih. Jadi (...)

1003. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, ya jadi itu ndak usah dibacakan kecuali kalau ada ini ... siapa tahu Anda mo ... memotong angka perolehan sendiri lagi di situ. Ada ... ada anu lagi ndak ... ada renvoi lagi?

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Enggak ada, enggak ada. Di sini ... jadi ... penambahan 7 suara, Yang Mulia.

1005. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu. Jadi, kalau begitu langsung ke Petitem saja.

1006. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Oke.

1007. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau begitu langsung ke Petitem saja, kalau tidak ada.

1008. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, oke.

1009. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebab yang tadi yang ... yang halaman 12 yang anu itu ... yang di uraian kan sudah direnvoi, kan?

1010. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

1011. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan Petitemnya dibaca sekarang!

1012. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL dan seterusnya sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil VI.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggota DPRD yang Kabupaten Muna Dapil VI sebagaimana tabel persandingan dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1013. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih karena ini menyangkut nama orang, saya anu dulu ... di sini kan tertulis yang di Petikum itu Muhammad Ilham Tang. Di sebelum-sebelumnya Muhammad Ilhan Tang, yang mana yang benar?

1014. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ilham.

1015. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ilham, ya? Pakai M, ya?

1016. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Pakai M, Yang Mulia.

1017. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, mama bukan November?

1018. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

1019. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, terima kasih. Saya mau anu dulu ... mau tanya dulu. Di ... coba Bapak buka di halaman 5 itu! Tabelnya.

1020. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

1021. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu suara Pak Maksum itu, apa persoalannya di situ?

1022. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, ya. Sebelumnya Pak Maksum ini unggul, Yang Mulia.

1023. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

1024. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

He eh. Begitu dilakukan PSU di 3 TPS tadi.

1025. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

He eh. Menjadi ... menjadi berkurang dan di ... Ahmadi menjadi unggul.

1027. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi di ... menurut Pemohon maupun Termohon itu memang suaranya segitu?

1028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, sebelum di PSU.

1029. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

964 itu?

1030. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

1031. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh. Oh, begitu ya.

1032. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

1033. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi, sekarang mau di ... problemnya ada di PSU itu?

1034. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya karena PSU (...)

1035. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pasca PSU?

1036. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya dan PSU terjadi hal yang sama. Jadi, kami meminta PSU kembali.

1037. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

PSU termasuk PSU. Nanti ada PSU jilid 2. PSUU? Nanti kayak *Game of Thrones* aja ini. Baik, Bapak menyerahkan bukti untuk yang Kolaka dulu, Pak ya?

1038. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Baik, Yang Mulia.

1039. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti P-2 DPRD KAB 1 sampai dengan P-2 DPRD KAB 19, betul?

1040. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Betul, Yang Mulia.

1041. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah diverifikasi, disahkan. Tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Daerah Pemilihan Muna 6 P du ... buktinya adalah P-2 DPRD KAB 1 sampai dengan P-2 DPRD KAB 21, betul?

1042. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Betul, Yang Mulia.

1043. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada catatan kecil sebenarnya, tapi penting. Cuma ini akan menyulitkan sesungguhnya untuk ... dapat menyulitkan ini. Baik Bapak maupun Pihak yang mau menanggapi karena waktu Bapak menyampaikan dalil, Bapak tidak merujuk bukti, itu saja sih.

1044. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya.

1045. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu. Tapi itu nanti silakan kepada Termohon dan ... dan Pihak Terkait kalau mau menanggapi ini. Jadi dengan demikian maka untuk Gerindra yang ini su ... sudah kita selesaikan dan sekarang masuk ke Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mohon berkenan, Yang Mulia.

1046. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Silakan! Siapa yang menyampaikan?

1047. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan renvoi, agar tidak kabur.

1048. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

1049. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Halaman 2, di paragraf paling atas itu di akhir alinea yang V itu diganti IV, Yang Mulia.

1050. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1051. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Dapil IV.

1052. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana lagi?

1053. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Kemudian di halaman 5, ini ada dalil yang tidak perlu, ya. Kami mohon ini didrop.

1054. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di mana?

1055. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Di halaman 5. Mulai dari kata persandingan dari judul Kabupaten Konawe Dapil IV, di bawahnya ada kata persandingan.

1056. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1057. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Sampai dengan poin 1, bahwa berdasarkan tabel di atas, itu mohon didrop semua.

1058. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Drop? Persandingan perolehan suara ini?

1059. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Persandingan (...)

1060. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk tabelnya?

1061. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Tabelnya termasuk.

1062. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Didrop, ya?

1063. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya, tidak relevan ini.

1064. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1065. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Sampai butir 1 bahwa berdasarkan tabel di atas, ini mohon didrop.

1066. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1067. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Diganti pengantarnya saja, Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengantarnya yang persandingan.

1069. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya ... enggak. Pengantarnya bunyinya begini, sebelum masuk 1 ... poin 1 ada kalimat penggantinya sederhana saja, "Bahwa dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Konawe Dapil IV, di Kecamatan Uepai" terdapat titik dua, lanjut ke sini.

1070. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Be ... pengantar ... pengantar yang Anda tambahkan secara lisan ini?

1071. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Sebelum masuk ke angka 1 poin 1 ada pengantarnya saja biar ... enak.

1072. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba ulang lagi pengantarnya!

1073. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

"Bahwa dalam Pemilu Legislatif Konawe Dapil IV di Kecamatan Uepai."

1074. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di Kecamatan?

1075. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Uepai, Uepai. Terdapat: lanjut ini.

1076. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Uepai terdapat.

1077. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Uepai, ya.

1078. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Kemudian renvoi terakhir itu di halaman 6, ini salah nulis angka. Disamakan dengan petitum.

1079. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di mana?

1080. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Poin 5. Halaman 6, poin 5.

1081. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

1082. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Jadi, "Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralaskan hukum jika di ...," Nah, ini nomor-nomor TPS nya mohon dicoret semua, diganti dengan TPS 4 Desa Anggopiu ini sudah benar, TPS 1 dan TPS 4, Desa Ameroro (...)

1083. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Amaroro? Amarura bukan?

1084. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ameroro.

1085. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Amarura!

1086. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ameroro. Ini mirip-mirip namanya, Yang Mulia.

1087. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ameroro.

1088. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

TPS (...)

1089. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Amaroa dia ... dicoret?

1090. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Lain lagi, lain lagi.

1091. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu juga (suara tidak terdengar jelas).

1092. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Di bawah itu lanjut lagi.

Jadi, kita samakan dengan yang di petitum. Jadi, TPS 4 Desa Anggopiu. Kemudian, TPS 1 dan TPS 4 Desa Ameroro. Terakhir TPS 2 Desa Amaroa.

1093. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ame siapa lagi ini?

1094. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ame Lawyer.

1095. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Amarora, ya?

1096. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ama (...)

1097. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 2?

1098. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Bukan.

1099. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang TPS 2.

1100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Amaroa.

1101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Amaroa?

1102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Amaroa. Sudah itu.

1103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, baik. Dimulai dari depan.

1104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Baik. Itu renvoinya sehingga tidak membingungkan. Bahwa pokok permohonan ini adalah minta PSU ya. Karena ada pelanggaran Pasal 372 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yaitu adanya 2 orang yang di sini di ketahui dan sudah mengakui Namanya Nasrudin dan Jabal Nur. Mereka memilih tanpa KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Inilah yang menjadi alasan untuk permohonan PSU sebagaimana diatur di Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ... di mana itu, dalil itu?

1106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ini di halaman 5 itu, Pak. Yang tadi banyak didrop itu.

1107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, di angka yang mana?

1108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Angka 1.1,1.2,1.3.

1109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu masih berlaku?

1110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih berlaku. Iya, masih berlaku.

1111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Masih berlaku. Yang atas saja itu tadi pak.

1112. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

"Bahwanya" itu, yang hilang, itu?

1113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya, bahwa yang poin 1 saja itu. Bahwa berdasarkan tabel data itu didrop ganti dengan yang tadi itu, Pak.

1114. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, jangan sambungan kalimat yang tadi Anda tambahkan itu.

1115.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya, lanjutnya masih tetap ini, 1.1, 1.2, 1.3. Masih tetap, ini yang diang (...)

1116.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Nasrudin dengan Jabal Nur ini?

1117.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Betul. Ya, ini 2 orang ini sudah mengaku dia mencoblos tidak sesuai aturan hukum oleh karena (...)

1118.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena mencoblos?

1119.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Dia mencoblos 2 kali di 2 TPS dan yang 1 tanpa menggunakan KTP.

1120.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua kali mengaku, ya?

1121.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Tanpa KTP-el.

1122.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1123.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Tanpa terdaftar di DPT, DPTb, dan juga tidak ada A5-nya juga pun tidak. Sudah dilaporkan ke Panwascam, namun menurut Panwascam

diarahkan untuk pemidanaan. Jadi, tidak apa namanya, kita tetap PSU (...)

1124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

1125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

PSU tidak dikabulkan tapi diarahkan untuk pemidanaan. Oleh karena itu, di sini pada pokoknya memohon agar dilakukan PSU.

1126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PSU?

1127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Itu saja, Yang Mulia.

1128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang prosedur pemidanaan sudah ditempuh belum?

1129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Kalau yang pemidanaan ... sebentar (...)

1130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melalui Gakkumdu.

1131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Gakkumdu. Dari ... keterangan dari prinsipalnya tidak ada, Yang Mulia. Karena kita mintanya PSU, tapi disuruh mempidanakan.

1132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itukan kemudian disalurkan ke Gakkumdu oleh Panwascam. Atau oleh, yang bersangkutan melapor ke Gakkumdu tidak ketika ... Prinsipal Anda itu?

1133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Kalau dari informasi yang kami terima, tidak ada informasi itu.

1134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada, ya?

1135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya.

1136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, langsung petitum.

1137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya, petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019. Nah, ini maaf ... bertanggal 21 Mei 2019, direnvoi, Yang Mulia, 21-nya dipindahkan ke belakang. Bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Dapil IV.

1138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS-nya enggak, ya?

1139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Di bawah ini, Yang Mulia

1140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Dapil IV pada.
 1. TPS 4 Desa Anggopiu (...)

1142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diperbaiki.

1143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

2. TPS 1 dan TPS 4 Desa Ameroro.
3. Di TPS 2 Desa Amaroa.
4. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Terima kasih.

1146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi Petitumnya sudah sesuai dengan yang direnvoi di depan, ya?

1147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya, petitumnya sudah ... itu betul.

1148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Catatan tidak ada, Pak Ketua, ini.

1149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Nanti kami ada bukti tambahan akan diserahkan di bawah.

1150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1151. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sebelum ke bukti tambahan, terima kasih, Yang Mulia, Pak Dr. Suhartoyo.

Untuk lebih mengklarikan, jadi untuk yang halaman 5 kami bacakan renvoinya jadi begini, ya?

1152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Baik.

1153. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bahwa dalam Pemilu Legislatif dapil ... Kabupaten Konawe Dapil IV di Kecamatan Uepai terdapat (...)

1154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Titik dua.

1155. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Titik dua.

1.1 pemilih bernama Nasrudin

1.2 pemilih bernama Jabarnur

1.3 dengan demikian Nasrudin telah
Itu ... itu tetap, ya?

**1156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-
29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Itu tetap, ya.

1157. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Supaya nanti orang nanggapi enggak bingung juga.

**1158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-
29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Betul, Yang Mulia.

1159. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena nanti ini (...)

**1160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-
29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Maklum, ya (...)

1161. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kamudian yang halaman 6, saya ulang baca lagi angka 5, ya.

**1162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-
29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Ya.

1163. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika di TPS 4 Desa Anggopiu, TPS 1 dan TPS 4 Desa Ameroro.

**1164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-
29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Ya, betul.

1165. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dilakukan pemungutan suara ulang (...)

1166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Dan TPS 2 Amaroa.

1167. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan TPS 2?

1168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Amaroa.

1169. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

TPS 2 Amaroa.

1170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Sama seperti Petitem.

1171. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan TPS 2?

1172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Amer ... Amaroa.

1173. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu Desa, ya?

1174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Desa Amaroa, ya.

1175. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Desa Amaroa. Oh ya. Ini yang sesuai dengan ini.

1176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Petitumnya.

1177. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di ... apa ... dilakukan pemungutan suara ulang.

1178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya.

1179. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi begitu bunyinya, ya?

1180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Betul, Yang Mulia.

1181. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ulang sekali lagi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika di TPS 4 Desa Anggopiu, TPS 1 dan TPS 4 Desa Ameroro, dan TPS ... berapa tadi?

1182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

2, Desa Amaroa.

1183. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Amaroa. Dilakukan pemungutan suara ulang. Begitu, ya?

1184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Betul, Yang Mulia.

1185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya?

1186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Betul, Yang Mulia.

1187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada renvoi yang lain, ya?

1188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Cukup, Yang Mulia.

1189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup. Baik. Dengan demikian untuk renvoinya sudah. Kalau bukti di luar yang akan Anda sampaikan nanti itu, itu yang nanti akan perlu kami verifikasi lagi.

1190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya.

1191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-6, benar?

1192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Ya, betul, betul, betul.

1193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jangan ragu-ragu.

1194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Betul, betul.

1195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu. P-1 sampai dengan P-6, ya?

1196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Betul, betul, maaf.

1197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk bukti yang nanti akan diserahkan ... bukti tambahan yang akan diserahkan lagi itu ketentuannya sama.

1198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Baik.

1199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti Anda, ya, kalau sekarang sudah ini langsung dengan ... dengan ... dengan penomorannya, ya. Jadi ndak boleh diserahkan sekarang lalu penomorannya melampaui nanti keterangan Pihak Terkait dan ini itu tidak akan kami terima. Sekarang saja langsung dibuat penomorannya. Nanti supaya bisa kami sekalian verifikasi, begitu, ya?

Baik. Terima kasih.

Dengan demikian untuk Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PDI Perjuangan sudah kita selesaikan.

Sekarang ke perkara yang terakhir, kecuali nanti jika dari Partai Amanat Nasional Nomor 130/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 datang.

Jadi, sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019, ini perkara DPD. Ya.

Kami mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun ini.

1200. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kami persilakan yang menjadi juru bicaranya, Kuasanya!

**1201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya mohon maaf, Yang Mulia. Ini kita ada surat kuasa tambahan baru, Yang Mulia. Kalau diperkenankan, Yang Mulia. Saya serahkan dulu atau nanti, Yang Mulia?

1202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi yang bersangkutan malah enggak hadir?

**1203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Yang bersangkutan di dalam permohonan kuasa itu tidak hadir. Jadi (...)

1204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan prinsipal, maksudnya, yang (...)

**1205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Oh, yang prinsipal.

1206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa itu enggak hadir?

**1207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Enggak. Enggak hadir.

1208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan yang hadir?

**1209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Tambahan.

1210. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang hadir yang tambahan?

**1211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Yang hadir yang tambahan.

1212. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Diambil saja, deh! Petugas mohon ... ya.

**1213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29
DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA**

Baik, Yang Mulia. Dilanjutkan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Terkait dengan kedudukan hukum atau Legal Standing Pemohon dianggap dibacakan, dan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sulawesi Tenggara berpengaruh pada terpilihnya Pemohon sebagai berikut.

Perolehan suara calon anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon a quo Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 1 perolehan suara menurut Termohon. Khusus yang dibacakan adalah Nomor Urut 29, dr. Dewa Putu Ardika Seputra, S.Pog., dengan perolehan suara=52.480, dan menduduki posisi peringkat ke-4. Dan Pemohon berada di Nomor Urut 31, atas nama Fatmayani Harli Tombili. Dengan perolehan suara=52.258, dalam peringkat ke-5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selisih suara Pemohon dengan peringkat ke-4 hanya terpaut 222 suara dan itu kita masukkan dalam Bukti P-1. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam tabel 1

mengandung cacat yuridis atau cacat hukum karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam tabel 1, diakibatkan Termohon dalam hal ini KPU Kota Bau-Bau tidak melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti P-3. Di dalam tabel yang di bawah ini, Yang Mulia, nomor dan tanggal rekomendasi Bawaslu itu sama yaitu Nomor 51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/2019 tanggal 25 April memerintahkan KPU Kota Baubau terutama di Kelurahan Bataraguru di TPS 02 dan TPS 03 untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Bahwa alasan Bawaslu Provinsi menerbitkan rekomendasi a quo adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pencermatan yang telah dilakukan di TPS 02 Kelurahan Batar ... Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Formulir C-1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 orang. Namun keempat orang tersebut tidak memiliki Formulir Model A-5 dan hanya 3 orang yang tercatat dalam Model A.DPK-KPU. Selain itu ditemukan jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 orang dan tidak tercatat dalam Model A.DPK-KPU.
 - b. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 3 Kelurahan Bataraguru, kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau bahwa jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 orang, namun hanya 1 orang yang memiliki Formulir A-5 yang berdomisili di Salakmadu, Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan 4 orang lainnya tidak memiliki Formulir A-5 atau bukti identitas lainnya, tetapi KPPS mengizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.
4. Bahwa kedua fakta tersebut tentu menjadi alasan kuat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 karena terbukti sudah lebih dari 1 orang yang memilih tanpa hak yang diberikan undang-undang.
5. Bahwa dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut (...)

1214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang (...)

1215.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

Yang khusus dibacakan di huruf d, pemilih yang tidak memiliki kartu penduduk elektronik yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 huruf J, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten/Kota, wajib dengan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan pengawas pemilu.
7. Bahwa dalam rangka menegakkan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi, maka sudah seharusnya rekomendasi Bawaslu yang sangat berdasar secara hukum untuk ditindaklanjuti oleh Termohon.
8. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dengan peringkat keempat hanya terpaut 222 suara, maka tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan PSU sangat signifikan memengaruhi hasil pemilihan anggota DPD di Sultra.
9. Bahwa signifikansi ... signifikansi tersebut juga bisa dilihat dari daftar jumlah pemilih tetap (DPT) pada 2 TPS dimaksud yang jauh melebihi selisih Pemohon, dengan peringkat 4, deng ... yang tercantum di dalam Bukti P-2. Yang di mana masing-masing TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu, itu berjumlah keseluruhan, Yang Mulia, 512 orang, Yang Mulia.
10. Bahwa dengan demikian apabila PSU dilakukan, maka sangat akan berpengaruh terhadap peringkat keterpilihan Calon Anggota DPD Sultra karena dengan 512 suara a quo bisa merubah posisi keterpilihan calon, khususnya antara Pemohon dengan Calon Peringkat Nomor 4.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon sangat beralasan secara hukum.

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 LIII.30.Sultra khusus untuk perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang perolehan suara di Kota Bau-Bau, Kecamatan Wolio, Kelurahan Bataraguru TPS 02 dan TPS 03.
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1216. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Kuasa Pemohon belum menyatakan bukti advokat. Sudah?

1217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

Ya, sudah, Yang Mulia. Cuma itu kan perpanjangan, Yang Mulia. Jadi dalam surat Peradi itu ada khusus, Yang Mulia. Saya sudah, Yang Mulia. Mungkin yang pertama yang belum, Yang Mulia. Nanti akan kita lengkapi, Yang Mulia.

1218. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira sudah jelas. Tinggal buktinya, silakan Pak Ketua!

1219. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Ini Permohonan Saudara ini agak menyulitkan juga ini karena ndak ada halamannya. Jadi, bisa jadi kena pelebaran jalan mungkin halamannya itu ya?

1220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

Ya, mohon ... nanti akan diperbaiki, Yang Mulia. Direnvoi, Yang Mulia.

1221. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ... kama ... kami terpaksa tulis sendiri itu, ya, jadi (...)

1222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

1223. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Saya maafkan.
Anda menyerahkan Bukti P-1 sampai P-2, ya?

1224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

P-3, Yang Mulia.

1225. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-3 itu yang itu yang mau saya sebutkan P-3 memang disebutkan, bukan PPP yang itu tadi ya.
P-3 memang disebutkan, tapi bukti fisiknya tidak ada.

1226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

Oh, nanti akan kita susulkan.

1227. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu yang kami sahkan P-1 dengan P-2, ya?

1228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA

Baik, Yang Mulia.

1229. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cuma itu yang belum. Yang sudah diverifikasi dan tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Sampai dengan saat kita memeriksa Permohonan yang terakhir ini, ternyata dari Partai Amanat Nasional belum juga ada kabar berita dan Berkarya. Nah, kalau dari Partai Amat Nasional itu karena calonnya adalah mirip seperti PPP tadi itu calon perseorangan, tetapi bedanya dengan PPP barangkali atau jangan-jangan sudah diselesaikan secara adat juga itu ya? Ndak tau ya, tapi mudah-mudahan juga yang kami berdoa ajukan mudah-mudahan PPP juga diselesaikan secara adat, secara intenal, gitu PPP. Sehingga tidak perlu ada ini ... sehingga kalau

dua-duanya semuanya bisa diselesaikan secara internal, kita bisa melihat senyum lebar dari Termohon, sehingga tidak perlu menanggapi ini, kan begitu risikonya.

Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Dengan demikian karena sudah selesai, maka kami ingin menyampaikan pemberitahuan yang sekaligus akan berlaku sebagai panggilan sidang. Yaitu bahwa untuk pemeriksaan persidangan yaitu dengan agenda memori ... memeriksa atau mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti, itu akan dilaksanakan pada hari Rabu mohon dicatat. Pada hari Rabu, 17 Juli 2019 pada pukul 13.30 WIB. Sekali lagi Rabu, 17 Juli 2019 pukul 13.30 WIB.

Nah, sementara itu, ini khusus untuk Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Perbaikan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, harus sudah kami terima paling lambat Senin, 15 Juli 2019 pada pukul 12.00 WIB. Sekali lagi, untuk Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu terima paling lambat Senin, 15 Juli 2019 pada pukul 12.00 WIB sudah harus kami terima.

Dengan demikian, maka kepada Para Pemohon yang tadi saya masih anu tunda dulu ininya pengumumannya yang hendak menyerahkan bukti tambahan, ya, yang hendak menyerahkan bukti tambahan, tidak boleh melampaui hari Senin, 15 Juli 2019 pukul 12.00 WIB itu. Ketika Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu juga diterima oleh Mahkamah. Begitu, ya? Sudah jelas semua? Sudah jelas, ya.

Baik, dengan demikian, maka sidang ini telah selesai untuk kloter ini dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.36 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001